



**PENELITIAN
PENGARUH PROGRAM
SERTIPIKASI TANAH
TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
STUDI KASUS
DI LIMA PROVINSI**

**ARDITYA WICAKSONO
ROMI NUGROHO
M. NAZIR SALIM**



**PUSLITBANG ATR/BPN PRESS
2020**



**PENELITIAN PENGARUH PROGRAM
SERTIPIKASI TANAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT
STUDI KASUS DI LIMA PROVINSI**

**Arditya Wicaksono
Romi Nugroho
M. Natzir Salim**



Puslitbang ATR/BPN Press didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 279/SK-100.LB.03/IV/2020 tanggal 9 April 2020. Bertujuan untuk memfasilitasi dan melayani penerbitan naskah-naskah karya peneliti dan staf di seluruh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional.

PENELITIAN PENGARUH PROGRAM SERTIPIKASI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI LIMA PROVINSI

Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press, Desember 2020

Copyright© pada Puslitbang ATR/BPN Press
Anggota IKAPI
Cetakan pertama, Desember 2020
ISBN 978-623-96953-7-8

Penulis :
Arditya Wicaksono
Romi Nugroho
M. Nazir Salim

Diterbitkan oleh :

Puslitbang ATR/BPN Press

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Jl. Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab. Bogor 16966

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat merupakan salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSK-ATP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab salah satu Indikator Kinerja Utama yakni berapa besar peningkatan pendapatan penerima program strategis Kementerian ATR/BPN .

Laporan penelitian ini telah melalui berbagai tahapan/proses sesuai kaidah penelitian dimulai dari penyusunan rancangan dan instrumen penelitian, pengumpulan data lapang, pengolahan data dan seminar akhir. Dari awal hingga akhir proses penelitian mendapat banyak dukungan, saran dan kritik yang penekanannya pada kualitas penelitian. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini. Tanpa mengesampingkan peran yang lain, perkenankan kami berterima kasih kepada:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan arahan, pemikiran dan motivasi untuk seluruh jajaran PPSK-ATP;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang memberikan masukan dalam merancang berbagai tema-tema penelitian yang harus dikaji oleh PPSK-ATP;
3. Para Narasumber dan Moderator yang turut mengawal dan memberikan masukan, seperti Bapak Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats., Sudaryanto, S.H., M.M, Ir. Andry Novijandri, Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc., Muhammad Arifin Siregar, S.T., M.E., Marthalina Indhawati, S.T., M.Sc., Ir. Hadi Arnowo, M.App.Sc., Raffli Noor, S.Si., MURP. dari Bappenas, Ratih Purbasari Kania dan Gede Edy Prasetya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Lebak;
5. Instansi Pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perangkat Desa), Swasta, dan masyarakat di

lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permintaan maaf kami sampaikan atas kekurangan dan kelemahan yang terkandung di dalam laporan. Namun demikian semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan manfaat bagi penyusunan kebijakan Kementerian ATR/BPN atau kepentingan praktis lainnya. Kami mengharapkan adanya masukan berupa saran dan kritik konstruktif guna menyempurnakan laporan penelitian pada masa yang akan datang.

Bogor, 11 Desember 2020

Kepala Pusat

Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan
Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.

NIP. 19650805 199203 1 003

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Riset ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S dan segenap narasumber atas perhatian, arahan serta keluangan waktunya sehingga kami tim peneliti mampu merampungkan penelitian ini.

Berbagai tahapan/proses sesuai kaidah ilmiah lazimnya penelitian telah kami lalui dengan segala kerendahan hati untuk mendengar, menyimak dan menangkap berbagai macam temuan lapang dan masukan hasil diskusi sehingga kita memberikan alternatif jawaban terhadap salah satu Indikator Kinerja Utama yakni peningkatan pendapatan penerima manfaat program strategis Kementerian ATR/BPN.

Diskusi dan pembahasan akan hasil riset ini semoga tetap memacu tim peneliti, pegiat agraria, dan pemangku kepentingan di Kementerian untuk terus berdenyut ditengah pandemi. Program strategis yang membawa pengaruh ke peningkatan pendapatan ini semoga menjadi oase di tengah upaya lembaga yang kita cintai ini menuju lembaga yang melayani, profesional, terpercaya dan berstandar dunia. Langkah-lagkah sistematis, pendekatan holistik dan kolaborasi menjadi solusi dari persoalan besar yang menjadi tanggung jawab kementerian kita. Penulis menyadari bahwa riset ini masih jauh dari sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat dapat diperbaiki di kemudian hari.

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKTA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. Pengantar	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
II. Tinjauan Literatur	9
A. Reforma Agraria dan Pengalaman Beberapa Negara	9
B. Kerangka Teori Pengaruh Reforma Agraria ke Produktivitas	14
C. Kepemilikan Tanah dan Produktivitas	14
1. Redistribusi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	15
2. Program Pemberdayaan	16
D. Penelitian Terdahulu	18
III. Metode Penelitian	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Kerangka Pikir Penelitian	23
C. Teknik Pemilihan Sampling	24
D. Teknik Analisis Data	27
1. Analisis Deskriptif	27
2. Analisis Inferensial	28
3. Analisis Panel Data	28
IV. Gambaran Umum Hasil Survei	33
A. Sampel Survei Masyarakat	33
B. Statistik Deskriptif	34
C. Perbedaan Pengeluaran Rumah Tangga Penerima dan Bukan Penerima Program	36
D. Perbedaan Karakteristik Responden Antar Kelompok	42

E.	Persepsi Masyarakat Penerima Program Terhadap Manfaat Program Sertipikasi Tanah	45
V.	Hasil dan Pembahasan	49
A.	Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Menggunakan Data Sekunder	49
B.	Hasil Estimasi Dampak Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Primer	53
1.	Sumber Perbedaan Pengeluaran Perkapita dari Perbedaan Karakteristik Rumah Tangga	54
2.	Pengaruh Program Strategis dan Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat	58
VI.	Kesimpulan dan Rekomendasi	63
	Kesimpulan	63
	Rekomendasi	63
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Reforma Agraria di Berbagai Negara.....	9
Tabel 2	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	17
Tabel 3	Komponen dan Variabel Penelitian Data Primer.....	25
Tabel 4	Data Sekunder	26
Tabel 5	Gambaran Sampel Masyarakat.....	33
Tabel 6	Statistik Deskriptif Hasil Survei.....	35
Tabel 7	Kesimpulan Hasil Uji Beda Rata-rata Pengeluaran Perkapita Antar Kelompok.....	36
Tabel 8	Kesimpulan Hasil Uji Beda Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Antar Pengelompokan	42
Tabel 9	R-Square Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Sekunder	49
Tabel 10	Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Sekunder	50
Tabel 11	Opsi untuk dimasukkan dalam Sensus Ekonomi dan Sosial	56
Tabel 12	Hasil Estimasi Pengaruh Program Strategis dan Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Sertipikat Tanah	3
Gambar 2	Kerangka Konsep Program Reformasi Agraria di Indonesia.....	11
Gambar 3	Pemberdayaan Pertanahan - Kerangka Makro Logika Intervensi.....	18
Gambar 4	Optimalisasi Lahan Berbasis Pemberdayaan.....	18
Gambar 5	Kerangka Pikir Penelitian	24
Gambar 6	Pemilihan Wilayah Sampel dan Tahapan Pemilihan Sampling...	24
Gambar 7	Distribusi Variabel Dependen (Pengeluaran Bulanan)	36
Gambar 8	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Program.....	37
Gambar 9	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Partisipasi Pelatihan.....	37
Gambar 10	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Partisipasi Bantuan Pemasaran.....	38
Gambar 11	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama.....	39
Gambar 12	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Akses Kredit	39
Gambar 13	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Tanah	40
Gambar 14	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Wilayah Survei	40
Gambar 15	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Status Penggunaan Sertipikat.....	41
Gambar 16	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	41
Gambar 17	Komposisi Lapangan Pekerjaan Utama Antar Kelompok Program.....	43
Gambar 18	Komposisi Kepemilikan Akses Kredit Antar Kelompok Program.....	43
Gambar 19	Komposisi Penggunaan Tanah Obyek Survei Antar Kelompok Program.....	44



Gambar 20	Komposisi Wilayah Antar Kelompok Program.....	44
Gambar 21	Komposisi Penggunaan Sertipikat Tanah Antar Kelompok Program.....	45
Gambar 22	Pendapat Mengenai Kebermanfaatan Program Sertifikasi Tanah yang Sudah Diterima (1-6, semakin tinggi semakin setuju)	46
Gambar 23	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) vs Penduduk	51
Gambar 24	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) vs Indikator Pembangunan (Output/PDB Pertanian)	51
Gambar 25	Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) vs Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	52
Gambar 26	Jumlah Sertifikasi vs Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB)...	52



BAB 1

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Sejak medio tahun 1980-an¹, pemerintah Indonesia telah mempromosikan program sertipikasi tanah sebagai kebijakan pembangunan nasional. Promosi ini telah dilakukan dengan menyusun program nasional seperti Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 1980-an. Kemudian muncul program serupa yakni Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) di tahun 2008, yang diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendaftarkan tanah di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia². Program legalisasi aset yang dibiayai oleh negara memiliki jenis yang beragam diantaranya sertipikasi PRONA, UKM, Nelayan, Pertanian, Transmigrasi dan program kerjasama dengan Menpera (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) termasuk redistribusi tanah. Mulai tahun 2017, program legalisasi aset dengan sumber APBN lebih dikenal dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pelaksanaan Program PTSL oleh pemerintah setiap tahunnya memiliki tujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. Salah satu produk dari pelaksanaan Program PTSL adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Dengan adanya dampak sosial dan ekonomi dari sertipikat hak atas tanah maka harapan masyarakat terhadap Program PTSL akan semakin meningkat.

Bingkai program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan kegiatan melalui Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan mampu meningkatkan sumber penghidupan masyarakat, mengurangi sengketa dan mengurangi ketimpangan khususnya terkait dengan pemilikan tanah. Pengertian Reforma Agraria adalah cara sistemik yang terencana untuk dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu dan cenderung terbatas dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mampu membuka jalan bagi terbentuknya

1 Konteks tahun 80-an diambil sebagai starting poin berkenaan dengan Keputusan Presiden No 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menjadi lembaga tersendiri lepas dari kementerian dalam negeri setingkat direktorat jenderal agraria. Semenjak lahirnya UUPA negara berkepentingan dengan sertipikasi tanah Indonesia untuk didaftarkan

2 Wahid, Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta

masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan. Dimulai dengan menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya³. Dari pengertian tersebut tampak jelas bahwa Reforma Agraria yang yang dipandang sebagai program strategis pertanahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan tidak lupa menitikberatkan rasa keadilan. Tujuan ini tidak akan tercapai tanpa diikuti program yang sifatnya kontinyu guna meningkatkan produktivitas dari tanah itu sendiri dan pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui pemanfaatan sertipikat untuk kegiatan produktif sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan.

Kebijakan Reforma Agraria ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui reforma agraria ini tidak dapat tercapai jika tidak didukung dengan kebijakan lain. Kebijakan reforma agraria ini meliputi: 1) pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat Indonesia; 2) penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan dan kebutuhan lahan; 3) pengembangan usaha pertanian dengan metode aglomerasi atau cluster.

Pada tataran implementasi, pelaksanaan Reforma Agraria mengalami pasang surut yang mengakibatkan kurang terukurnya dampak/manfaat yang ditimbulkan dari program tersebut. *Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* Imaduddin Abdullah menyampaikan bahwa permasalahan reforma agraria khususnya distribusi tanah itu bukan sekedar distribusi saja, tetapi perlu ada pendampingan dari pemerintah. Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya pembagian aset melainkan diperlukan pembagian akses. Akses yang dimaksud bisa berupa pembiayaan, akses informasi dan teknologi⁴. Pemberian akses inilah yang masih menjadi permasalahan tersendiri mengingat lembaga yang menangani bisa lebih dari satu. Adanya beberapa lembaga yang bisa menangani diperlukan soliditas dan kolaborasi guna menghasilkan program serta pelaksanaan yang implementatif. Alhasil, masyarakat tidak mengalami kebingungan dan bisa langsung fokus pada upaya optimalisasi sumber daya tanah yang dimiliki.

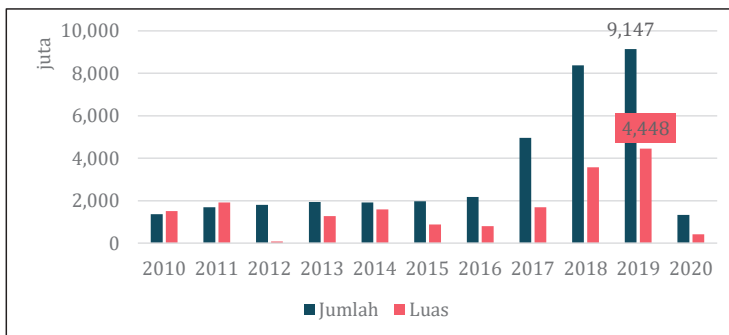
3 Bachriadi dan Wiradi, G. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). hal 55

4 Imaduddin Abdullah Pemerintah Diminta Bentuk Badan Pengelola Reforma Agraria Edisi 4 Mei 2017 <https://yogyakarta.kompas.com/read/2017/05/04/223331226/pemerintah.diminta.bentuk.badan.pengelola.reforma.agraria> diakses 16 mei 2020

Dari hasil pengamatan lain, yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai bahwa program Reforma Agraria yang dilaksanakan pemerintah dalam tiga tahun terakhir belum menjamin penerima sertipikat tanah menjadi sejahtera dengan pendampingan⁵. Masyarakat membutuhkan jaminan terkait dengan pengelolaan tanah, dukungan penuh agar sektor pertanian menjadi lebih solid mengingat minat masyarakat pada sektor ini dapat dikatakan semakin menurun. Program jaminan akan turut menjadikan masyarakat lebih kuat untuk tidak mengubah/mengalihfungsikan tanah-tanah yang dimiliki, khususnya tanah pertanian yang selama ini cukup produktif. Pendapatan menjadi salah satu kunci pembentuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui pelaksanaan program strategis pertanahan khususnya dalam bingkai Reforma Agraria. Pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria bermuara pada distribusi dan legalisasi aset melalui sertipikasi tanah beserta diperolehnya akses guna mengoptimalkan sumber daya tanah yang ada.

Program reforma agraria sampai tahun 2020 telah menghasilkan hak atas tanah sebanyak 68.817.623 dengan rincian hak milik sebanyak 62.797.554, hak guna bangunan 5.111.963, hak pakai 719.509, hak wakaf 149.254, hak guna usaha 24.438, dan hak pengelolaan 10.887. Penerbitkan sertipikat tanah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 9,147,391 sertipikat dengan luas tanah sebesar 4,448,088 juta ha. Dari total itu sebagian besar sertipikat (98.69%) dikuasai oleh perorangan. Realisasi program reforma agraria mencapai 9 juta hektar dengan 4,5 juta hektar dilakukan legalisasi aset dan 4,5 juta hektar dilakukan redistribusi tanah.

Gambar 1
Perkembangan Sertipikat Tanah



Sumber: Kementerian ATR medio Maret 2020⁶

5 Refleksi Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK : kembalikan Pada Prinsip dan Tujuan Pokok Agenda reforma Agraria Sejati <https://walhi.or.id/refleksi-tiga-tahun-reforma-agraria-pemerintahan-jokowojk>-kembalikan-pada-prinsip-dan-tujuan-pokok-agenda-reforma-agraria-sejati diakses 20 mei 2020
6 Dihimpun dari berbagai sumber di internal kementerian ATRBPN

Efektivitas program reforma agraria dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima program. Salah satu ukuran dari kesejahteraan adalah dari tingkat pendapatan masyarakat. Program untuk mempermudah kepemilikan sertipikasi tanah memiliki dasar apriori yang kuat dalam meningkatkan investasi dan produktivitas. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan hubungan signifikan antara akses sertipikasi tanah, investasi, dan produktivitas. Dasar hubungan kemudahan kepemilikan sertipikasi tanah ke produktivitas dijelaskan melalui kemudahan akses ke modal sehingga meningkatkan investasi kemudian produktivitas. Holde, Deininger, & Ghebru⁷ menemukan bahwa terjadi peningkatan investasi dikarenakan kepemilikan sertipikasi tanah yang kemudian menjelaskan 45% kenaikan produktivitas berdasarkan studinya di wilayah Tigray Ethiopia. Hubungan tersebut juga ditemukan oleh Melesse & Bulte.⁸ dan Ghebru & Holden berdasarkan hasil studinya di Afrika. Bradstock⁹ menunjukkan bahwa program distribusi tanah yang jauh dari lokasi tempat tinggal penerima manfaat dan tanpa dukungan program pertanian tidak memberikan dampak/manfaat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Sementara Mahpud, dkk¹⁰ menjelaskan bahwa kesejahteraan nelayan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatannya dengan menjaminkan sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya. Berbeda dengan hasil penelitian dari Istikomah¹¹ menemukan bahwa Program sertipikasi tanah UMK tahun 2008 yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo belum memunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses permodalan jika tidak ada upaya pendampingan. Program sertipikasi tanah di Indonesia telah berjalan lebih baik di beberapa provinsi dilihat dari nilai persentase penerima sertipikat tanah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, sudah banyak sertipikat yang sudah diberikan kepada masyarakat maka dirasa perlu untuk menganalisis pengaruh/manfaat dari program reforma agraria terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari peningkatan pendapatan.

7 Stein T. Holden, Klaus Deininger, Hosaena Ghebru. 2009. Impacts of Low-Cost Land Certification on Investment and Productivity American Journal of Agricultural Economics, Volume 91, Issue 2, May 2009, Pages 359-373, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2008.01241.x>

8 Ibid Stein T. Holden, Klaus Deininger, Hosaena Ghebru. hal 361

9 Mequanint B. Melesse. 2015 Does land registration and certification boost farm productivity? Evidence from Ethiopia <https://doi.org/10.1111/agec.12191>

10 Mahpud dkk, 2016. Determinan Kesiediaan Nelayan Mengagunkan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan. Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol. 13 No. 1 Maret 2016 hal 26-36

11 Istikomah, 2013. Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kawistara. Vol 3, No 1 April. 2013. Hal 24-40

B. Rumusan Masalah

Program sertipikasi tanah di Indonesia telah berjalan lebih baik di beberapa provinsi dilihat dari nilai persentase penerima sertipikat tanah. Untuk melihat pengaruh/manfaat dari program reforma agraria ini maka perlu dilakukan analisis pengaruh sertipikasi tanah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Secara umum permasalahan utama yang ingin dikaji dalam kajian ini adalah seberapa besar pengaruh program strategis pemerintah terhadap pendapatan masyarakat penerima program. Secara rinci beberapa permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh program strategis yang diberikan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima program?
2. Seberapa besar pengaruh peningkatan pendapatan penerima program strategis yang disertai dengan pemberdayaan dibandingkan dengan penerima program strategis tanpa pemberdayaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum penelitian ini merujuk pada Sasaran Strategis 1.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional yaitu menganalisis seberapa besar peningkatan pendapatan penerima program strategis. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. menganalisis seberapa besar pengaruh program strategis yang diberikan pemerintah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. menganalisis seberapa besar pengaruh peningkatan pendapatan masyarakat penerima program strategis yang diikuti dengan pemberdayaan dibandingkan dengan penerima program strategis tanpa pemberdayaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini maka dapat bermanfaat sebagai evaluasi implementasi program sertipikasi tanah dalam meningkatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat menjadi masukan bagi kelanjutan program ini sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai, strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan pendapatan penerima program.



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

A. Reforma Agraria dan Pengalaman Beberapa Negara

Agrarian reform, memiliki pengertian yang lebih luas, yang mencakup dua tujuan pokok yaitu bagaimana mencapai produksi yang lebih tinggi, dan bagaimana agar lebih dicapai keadilan. Menurut Nasikun (1998), pengertian hakiki dari konsep pembaruan agraria mengandung dua elemen, yaitu: nasionalisasi tanah (*land nationalization*) dan pengaturan kembali struktur penguasaan pemilikan tanah (*land tenure reform*). Dalam reforma agraria tercakup permasalahan redistribusi tanah, peningkatan produksi dan produktifitas, pengembangan kredit untuk pertanian, pajak lahan, hubungan penyakapan dan regulasi baru sistem pengupahan buruh tani, dan konsolidasi tanah. Ruang lingkup *land tenure reform* tidak sekedar redistribusi tanah (*landreform*) sebagai alat untuk melakukan *land tenure reform*, namun juga mencakup *access reform* untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi. Ada dua pembaruan yang harus dilakukan dalam pembaruan agraria, yaitu *land tenure reform* (hubungan pemilik dan penyakap) dan *land operation reform* (perubahan luas penguasaan, pola budidaya, hukum penguasaan, dan lain-lain).

Tabel 1
Reforma Agraria di Berbagai Negara

No	Negara	Waktu Pelaksanaan	Redistribusi Tanah	Dampak
1.	China	Periode pertama 5 tahun (1974-1952)	Rata-rata 25% dari luas desa	Tingkat pertumbuhan perkapita pertanian sebesar 1.3%
		Periode kedua 3 tahun (1981-1983)		Angka kemiskinan dari 33% penduduk pedesaan menjadi 4% dari penduduk pedesaan
2.	Filiphina	14 tahun (1972-1986)	41 ribu hektar	Pembangunan perumahan/ pemukiman yang diintegrasikan dengan redistribusi tanah
		8 tahun (1968-2004)	5.54 juta hektar tanah	Penerapan teknologi usaha tani yang dikembangkan IRRI untuk pertanian tanah sawah

No	Negara	Waktu Pelaksanaan	Redistribusi Tanah	Dampak
3.	Thailand	22 Tahun (1975-1997)	6.22 juta hektar	Pembangunan fisik seperti jaringan irigasi, kolam penampungan air, jalan usaha tani serta sarana dan prasarana irigasi, perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah selama periode tahun 1987-1991, penurunan kerusakan hutan selama periode 1962-1993 serta indicator ekonomi peserta land reform dapat dianalisis keberhasilannya
4.	Brasil	8 Tahun (2002-2010)	85.8 juta hektar	Menyelesaikan konflik yang berkelanjutan antara kelompok agrobisnis besar dan pertanian keluarga, membantu untuk membuat kompensasi sosial dan distribusi kekayaan.

Sumber: berbagai literatur dikompilasi

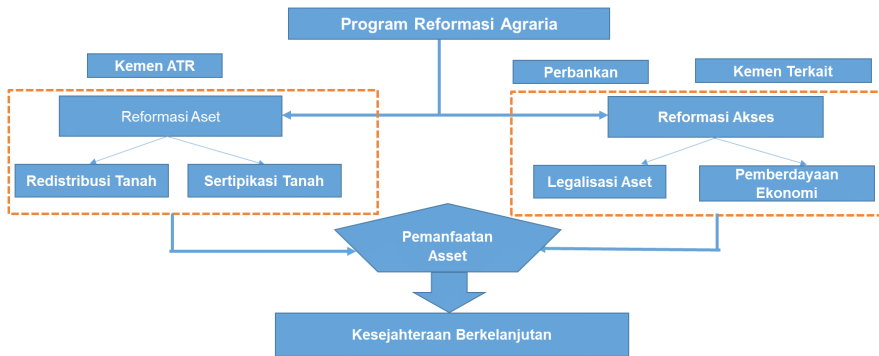
Pengertian *Agrarian Reform* dan *Landreform* di Thailand secara substansi tidak dibedakan. Menurut Suthiporn Chirapanda¹², *land reform* kurang dapat diterima masyarakat luas karena dikonotasi sebagai konsep komunisme. *Agrarian Reform* lebih dapat diterima karena merupakan strategi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan. Konsep *Agrarian Reform* yang dikembangkan oleh ALRO (*Agricultural landreform Office*), meliputi *landreform* dan berbagai infrastruktur pendukung yang memungkinkan terciptanya manfaat ekonomi dan kemandirian. Tiga komponen yaitu: (1) *reform land tenure structure*, (2) *reform of the production structure* dan (3) *reform of the supporting service structure*. Kaewkallaya et al. 2014¹³ menemukan, proyek *land reform* di Thailand menunjukkan peningkatan dalam aset mata pencaharian setiap petani setelah proyek dilakukan. Hasil serupa ditemukan oleh Mabhena¹⁴ dalam program kolaborasi reformasi agraria dan pengembangan pertanian di Zimbabwe.

Konsep reforma agraria di Philipina atau CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program) menurut Borras¹⁵ menekankan pada tiga pola *landreform*

- 12 Suthiporn Chirapanda. 2000. [National Report on Agrarian Reform and Rural Development in Thailand](#). Prepared by Agricultural Land Reform Office, Ministry ..., 2006
- 13 N Kaewkallaya, RP Shrestha, AP Tibkaew. 2014. Effect of agricultural land reform development project on rural livelihood: experience from Thailand. *international Journal of Environmental and Rural*. Page 20-25
- 14 Clifford Mabhena. 2014. Livestock livelihoods compromised: The dilemma of the Fast Track Land Reform and Resettlement Programme in Matabeleland South, Zimbabwe. *Journal of contemporary African studies*, Pages 100-117 |
- 15 Saturnino M. Borras. 2006. Pro-poor Land Reform: A Critique. *Studies in International Development and Globalization Series*. University of Ottawa Press, isbn 0776606506. Diakses tanggal 29 mei 2020

(1) redistribusi tanah privat dan tanah negara, (2) legalisasi sistem sewa tanah (*leasehold*) oleh tuan tanah untuk sejumlah tanah negara dan (3) pada skala usaha kecil dan terbatas selama beberapa tahun CARP mengembangkan pilihan untuk berbagai pola agribisnis. Sementara itu, konsep reforma agraria di Taiwan menurut Shen¹⁶ dilakukan melalui *landreform* yang menekankan pada dua hal yang mendasar, yaitu: peningkatan hubungan produktif pedesaan (*rural productive relationship*) dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan eksploitasi tenaga kerja *industrial* (*the exploitation of industrial manpower and the improvement of manpower quality*). Sementara itu Hsiao¹⁷ menambahkan tiga hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya, mendorong praktik-praktik demokrasi dan mencegah infiltrasi komunisme.

Gambar 2
Kerangka Konsep Program Reformasi Agraria di Indonesia



Sumber: Widodo, 2017

Konsep reforma agraria di Indonesia dapat dikemukakan bahwa reforma agraria pada dasarnya merupakan konsep *landreform* yang dilengkapi dengan dengan konsep *access reform* dan konsep *legal/regulation reform*. Konsep *land reform* dalam hal ini adalah penataan kembali struktur penguasaan pemilikan tanah yang lebih adil. Konsep *access reform* dalam arti penataan penggunaan pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana

16 TH Shen 1968. Land Reform and its Impact on Agricultural Development in Taiwan - Land Reform in Developing Countries

17 Hsiao.1996. Capital, The State, And Late Industrialization: Comparative Perspectives On the Pasific Rim, chapter 6

dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, perbankan. Konsep *policy/regulation reform* dalam hal ini adalah pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Salah satu aspek kecil dari reformasi agraria adalah sertipikasi tanah.

Sertipikasi tanah adalah pengakuan atas hak untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengatur subjek profesi redistribusi tanah yang terdiri dari 20 profesi yaitu petani, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer, pekerja harian lepas yang tidak memiliki tanah, buruh yang tidak memiliki tanah, pedagang informal yang tidak memiliki tanah, pekerja sektor informal yang tidak memiliki tanah, pegawai tidak tetap yang tidak memiliki tanah, pegawai swasta yang tidak memiliki tanah, PNS paling tinggi golongan III yang tidak memiliki tanah, TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letda/Ipda yang tidak memiliki tanah, profesi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan pengalaman di negara kapitalis barat, legalisasi aset properti memiliki lima efek positif, yaitu (1) properti akan meningkatkan potensi ekonomi jika potensi aset dapat diidentifikasi dan dikonversi menjadi modal, (2) hukum properti menyatukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi menjadi properti hukum formal sistem, (3) properti membuat orang semakin bertanggung jawab, karena properti mereka diakui secara hukum, (4) undang-undang properti menyebabkan aset semua orang berfungsi lebih baik, (5) hukum properti dapat membantu membentuk jaringan, dan (6) melalui hukum properti, transaksi apapun dapat dilindungi dengan lebih baik. Pertanahan adalah likuiditas dari aset tanah dalam menghadapi sektor perbankan, harapannya adalah dengan memegang sertipikat, rumah tangga akan dapat mengakses modal melalui perbankan. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.

Mayoritas masyarakat pedesaan enggan untuk meminjam uang di bank, terutama dengan jaminan dalam bentuk sertipikat tanah. Karena tanah memiliki sosiokultural yang tinggi, sehingga ada kecenderungan untuk mempertahankan dan meneruskannya ke generasi berikutnya. Selain itu, proses kredit dengan sertipikat tanah sebagai jaminan cenderung lebih rumit

dari asset bergerak, seperti motor. Utami¹⁸, yang menemukan bahwa *National Agrarian Reform Program (NARP)* tidak mencapai yang diharapkan keadilan agraria dari redistribusi tanahnya. Implementasi NARP di Serdang terbatas pada pendaftaran hak atas tanah secara gratis. Mulyani et al¹⁹ dan Utami²⁰ menunjukkan beberapa isu terkait dengan implementasi Program Reformasi Agraria Nasional, (1) partisipasi pemangku kepentingan masih rendah; (2) administrasi lintas sektoral sering kali menjadi kendala; (3) reformasi aset, yaitu, ketersediaan objek tanah yang akan didistribusikan kembali; dan (4) reformasi akses, misalnya kerja sama lintas sektor masih belum terjalin dengan baik sehingga kebijakan keuangan inklusi perlu mendukung program reforma agraria.

Pelaksanaan Pembaruan Agraria memerlukan dukungan moneter dan keuangan, baik yang bersifat pembiayaan langsung terhadap program itu, maupun kebijakan moneter dan keuangan untuk menggulirkan aktivitas ekonomi yang berpihak pada masyarakat banyak di wilayah pedesaan. Pembaruan agraria yang bertumpu pada pembangunan sektor pertanian dan pedesaan sangat bergantung pada investasi infrastruktur sektor publik sebagai pendorong investasi masyarakat petani, pihak swasta dan pelaku lain yang peduli dengan Reforma Agraria. Secara umum terdapat empat kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan, yaitu (1) usahatani basis tanah sawah, (2) usahatani basis tanah kering, (3) usahatani kebun dan agribisnis, (4) usahatani nonbasis tanah, seperti ternak unggas, kambing, sapi dan perikanan, serta luar usahatani, seperti usaha perdagangan, industri dan jasa. Pelaksanaan kegiatan usahatani dengan melibatkan instansi terkait di bidang pertanian, pengairan, akses jalan usahatani, pemasaran produksi, koperasi usahatani, perbankan dan sebagainya.

Syukur dalam Ashari²¹ menunjukkan fakta bahwa realisasi kredit sektor pertanian yang minim sudah berlangsung sejak lama, pada tahun 2000 misalnya, realisasi kredit sektor pertanian untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat bahkan tidak mencapai 3 persen dari total kredit sektoral di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kredit yang minim adalah masalah klasik yang sering dihadapi para petani atau pelaku usaha di sektor pertanian. Proporsi

18 Utami, P.A.R. (2014) Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai. *Premise Law Jurnal* 1(1), 1-16.hal 2

19 Mulyani, L., H. Yogaswara, L. Masnun, and R. Mardiana (2011) Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan. LIPI, Jakarta.

20 Ibid Utami, P.A.R. hal 5

21 Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agroekonomi. Vol 23,2 Desember 2005 : 132-147.

kredit sektor pertanian yang kecil berimplikasi pada sulitnya para petani untuk berkembang. Mengingat bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang penting, maka ketersediaannya menjadi aspek yang menentukan berjalannya suatu usaha. Lembaga pembiayaan formal seperti bank, kebanyakan bank lebih menysar petani-petani yang memiliki lahan yang luas (Nurmanaf)²².

B. Kerangka Teori Pengaruh Reforma Agraria ke Produktivitas

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan (fungsional) antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis adalah sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, R, T) \quad (2.1)$$

di mana Y adalah output, K adalah kapital, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan (*raw material*), dan T adalah Teknologi.

Aspek agrarian (Khususnya tanah) adalah faktor produksi pertanian yang paling penting. Menurut Ellis²³, kebijakan agraria adalah sangat penting karena secara ekonomi, tanah sangat berbeda dengan faktor produksi lainnya, seperti pupuk, tenaga kerja, benih, dll., yang dapat diperbanyak. Tanah, di sisi lain, adalah faktor produksi tetap. Tanah (faktor produksi tetap) ini juga mewakili modal dalam bentuk asset atau investasi yang juga merupakan indikator kesejahteraan. Breman dan Wiradi²⁴ menunjukkan adanya ketidaksetaraan kepemilikan tanah yang diikuti oleh gejala migrasi sirkuler dan internasional di Indonesia. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Widodo²⁵, adanya gejala migrasi di daerah perdesaan karena akses pekerjaan yang terbatas dan tantangan ekologis lahan kering. Petani kehilangan akses terhadap tanah yang ditunjukkan dari penurunan persentase pertanian dalam Produk Domestik Bruto, migrasi, dan pola mata pencaharian di luar pertanian (Rogan, 2011).

C. Kepemilikan Tanah dan Produktivitas

Kepemilikan sertifikasi tanah dapat meningkatkan pendapatan seseorang yang memilikinya melalui jalur kapital yaitu dengan bertambahnya modal

22 Nurmanaf, A.R. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 5 No. 2 Juni 2007: 99-109

23 Ellis, Frank 1992 *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. Diakses 22 Mei 2020

24 J.C. Breman & G. Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa*. Jakarta: LP3ES

25 Widodo. 2009. Strategi nafkah rumah tangga miskin di daerah pesisir Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur. Tesis pada Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB hal 56-66

yang digunakan. Penambahan modal ini dapat melalui penggunaan lahan menjadi lebih banyak, investasi tanaman yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, investasi sarana pertanian lain yang dapat meningkatkan produktivitas. Penambahan modal tersebut dapat terjadi apabila pemilik sertipikat menginvestasikan lebih banyak ke hal-hal tersebut atau pemilik sertipikat memanfaatkan kepemilikan tersebut untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih besar. Menggunakan bentuk linear fungsi produksi Cobb-Douglas untuk itu.

$$y_i = \alpha + a * k_i + (1 - a) * l_i + v_i \quad (2.2)$$

di mana adalah nilai tambah yang dihasilkan, luas tanah yang digunakan, adalah jumlah tenaga, dan adalah perbedaan produktivitas yang tidak dapat diobservasi kerja yang digunakan untuk mengelola tanah tersebut. Karena sertipikat tanah tidak meningkatkan tanah yang dimiliki melainkan meningkatkan penggunaan dan investasi lain maka dari itu,

$$v_i = f(\text{sert}_i, x_i) \quad (2.3)$$

di mana adalah dummy kepemilikan sertipikat tanah, adalah karakteristik individu yang termasuk pekerjaan, luas kepemilikan tanah, tingkat pendidikan, pemanfaatan tanah, jenis kelamin, keikutsertaan dalam program pemberdayaan, dan lokasi tempat tinggal, dan adalah dummy interaksi antara kepemilikan sertipikat dan karakteristik individu untuk melihat perbedaan dampak sertifikasi antar individu dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga,

$$y_i = \alpha + a * k_i + (1 - a) * l_i + \gamma * \text{sert}_i + \beta * x_i + \psi * (x_i * \text{sert}_i) + e_i \quad (2.4)$$

di mana adalah *white noise error* yang berdistribusi normal dan memiliki rata-rata nol. Untuk menguji apakah hasil estimasi yang dilakukan memenuhi kriteria statistik maka serangkaian uji asumsi klasik dilakukan yaitu normalitas dan heteroskedastisitas.

1. Redistribusi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program redistribusi dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan secara keseluruhan dan tidak berpengaruh (Bourguignon, 2000). Dua pandangan yang berbeda ini didasarkan pada asumsi yang berbeda terkait pasar yaitu adanya pasar modal yang sempurna dan tidak. Ketika pasar modal sempurna maka faktor produksi modal akan memberikan pengembalian yang

sama bagaimanapun modal tersebut terdistribusi, tetapi jika pasar modal tidak sempurna maka kemungkinan seseorang yang memiliki pengembalian lebih tinggi tidak mendapatkan akses ke modal sehingga tidak bisa memaksimalkan tingkat pengembaliannya. Maka dari itu, dengan melihat bahwa pasar modal di Indonesia tidak sempurna maka diduga program redistribusi dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

$$\text{Marginal Productivity of Capital} = \frac{v_i \alpha K_i^\alpha L^{1-\alpha}}{K_i} \quad (2.5)$$

Karena tenaga kerja hanya pemilik modal dan dinormalisasi menjadi 1 maka,

$$\text{Marginal Productivity of Capital} = \frac{v_i \alpha K_i^\alpha}{K_i} \quad (2.6)$$

Untuk melihat apakah pasar modal tidak sempurna dan program redistribusi dapat berhasil meningkatkan pendapatan maka penelitian ini membandingkan seberapa besar *marginal productivity of capital* individu yang memiliki sertipikasi tanah dan individu yang tidak memiliki sertipikasi tanah. Uji beda statistik digunakan untuk melihat apakah perbedaan antar kelompok individu tersebut nyata, sehingga dengan diketahuinya perbedaan tersebut maka dapat diketahui apakah program redistribusi akan berpengaruh ke pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

2. Program Pemberdayaan

Program *land reform* tidak akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat jika tidak diikuti dengan *access reform*. Mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga pengguna lahan sebanyak 27,6 juta rumah tangga, yang mana mayoritasnya adalah rumah tangga petani gurem sebanyak 16,2 juta. Petani gurem adalah petani yang hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Berdasarkan data diatas, maka program reforma agraria akan gagal dalam mencapai tujuannya jika tidak diikuti dengan *access reform*. Dengan *access reform* membantu masyarakat penerima program untuk memaksimalkan tanah/lahan yang mereka miliki. Untuk itu pelaksanaan *land reform* ini perlu dukungan *access reform* yaitu berupa pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok pertanian, pelatihan meningkatkan keahlian, memberikan bantuan bibit, pupuk dan alat-alat/teknologi pertanian, memberikan permodalan dengan biaya yang murah, membantu memasarkan produknya.

Konsep pemberdayaan pertanahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR ada 7 yaitu pembentukan organisasi/penguatan kelembagaan, infrastruktur, pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan, permodalan, interkoneksi dengan dunia usaha/kemitraan, pemasaran/tata niaga. Penjelasan detail program disajikan pada Tabel 2 berikut,

Tabel 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Pembentukan Organisasi/ Penguatan Kelembagaan	Terhadap kegiatan usaha yang akan mendapatkan bantuan permodalan, pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan bimbingan teknik/ pelatihan oleh pemangku kepentingan terkait
2.	Infrastruktur	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penataan akses bagi masyarakat
3	Pembinaan, Pelatihan, Fasilitasi Dan Pendampingan	Pemberian pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan yang dibutuhkan masyarakat
4	Permodalan	Akses permodalan dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
5	Interkoneksi Dengan Dunia Usaha/Kemitraan	Fasilitasi penyaluran bahan baku bagi industri-industri hilir didasarkan kepada kesepakatan para pihak
6	Pemasaran/Tata Niaga	Bantuan pemasaran hasil produksi dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait

Sumber: Bahan Paparan Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Tahun 2020

Gambar 3 Pemberdayaan Pertanian -Kerangka Makro Logika Intervensi



Sumber: Bahan Paparan Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Tahun 2020

Gambar 4 Optimalisasi Lahan Berbasis Pemberdayaan



Sumber: Bahan Paparan Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Tahun 2020

D. Penelitian Terdahulu

Program untuk mempermudah kepemilikan sertipikasi tanah memiliki dasar a priori yang kuat dalam meningkatkan investasi dan produktivitas hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan hubungan signifikan antara akses sertipikasi tanah, investasi, dan produktivitas sementara itu ada beberapa penelitian tidak menemukannya. Dasar hubungan kemudahan kepemilikan sertipikasi tanah ke produktivitas dijelaskan melalui kemudahan akses ke modal sehingga meningkatkan investasi dan kemudahan

produktivitas. Holde, Deininger, & Ghebru (2009) menemukan bahwa terjadi peningkatan investasi dikarenakan kepemilikan sertipikasi tanah yang kemudian menjelaskan 45% kenaikan produktivitas berdasarkan studinya di wilayah Tigray Ethiopia. Hubungan tersebut juga ditemukan oleh Melesse & Bulte (2015) dan Ghebru & Holden (2015) berdasarkan hasil studinya di Afrika. Berbeda dengan dugaan teori, Fenske (2011) tidak menemukan bukti hubungan kepemilikan tanah terhadap investasi berdasarkan hasil studinya di Afrika.

Mencari bukti hubungan kepemilikan sertipikasi tanah, investasi, dan produktivitas beberapa penelitian sebelumnya menawarkan metode analisis yang berbeda yaitu antara lain metode regresi panel sederhana, propensity score matching yang dikombinasikan dengan regresi logit, dan quasi experimental. Holde, Deininger, & Ghebru (2009) mengestimasi tiga model dikarenakan kepemilikan sertipikasi tidak secara langsung memengaruhi produktivitas, model yang diestimasi yaitu model kepemilikan sertifikasi tanah, model investasi yang dipengaruhi kepemilikan sertifikasi tanah, dan model produktivitas yang dipengaruhi investasi. Melesse & Bulte (2015) menggunakan propensity score matching untuk mengelompokkan observasi yang memiliki karakteristik sama kemudian mengaplikasikan regresi logit untuk mengetahui dampak sertifikasi tanah ke produktivitas pertanian. Sementara itu Holde, Deininger, & Ghebru (2015) menggunakan metode quasi experimental, melihat langsung dampak sertifikasi tanah ke produktivitas.

Hasil penelitian terkait program sertipikasi tanah juga ditemukan di Indonesia. Istikomah (2013) melakukan studi dampak program sertipikasi tanah terhadap permodalan bagi usaha mikro dan kecil di Kulon Progo dan menemukan bahwa program sertipikasi tanah UMK tahun 2008 yang dilaksanakan di Kulon Progo belum mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap peningkatan akses permodalan. Mahpud,dkk. (2015) melakukan studi tentang kesiediaan nelayan mengagunkan sertipikat hak atas tanah dan menemukan bahwa status nelayan, pendidikan, luas tanah, memiliki aset lain dan usaha sampingan adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjaminkan sertipikat hak atas tanah yang diperoleh dari "Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah. Sementara itu, Tim Peneliti Smeru (2002) melakukan evaluasi terhadap pendaftaran tanah secara sistematis melalui PAP dan menemukan bahwa PAP memberikan pengaruh yang cukup signifikan (12,8%) dalam peningkatan penggunaan sertipikat sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian Pengaruh Program Strategis Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sudut pandang kuantitatif untuk menganalisis pengaruh program strategis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan metode survei. Metode ini dipilih karena hasil utama yang akan dicapai berupa angka kuantitatif tentang besaran peningkatan pendapatan masyarakat dan adanya proyeksi apabila menginginkan peningkatan (n) persen maka langkah apa yang perlu di ambil oleh kementerian ATR/BPN. Melalui instrumen yang disusun dalam bentuk kuesioner diharapkan mampu merepresentasikan seluruh pertanyaan penelitian sehingga diperoleh data dan informasi dalam jumlah yang cukup. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk menguatkan justifikasi temuan atau sebagai pemaknaan apabila hitungan kuantitatif belum cukup signifikan. Metode yang dipakai adalah *indepth interview* melalui Diskusi Group Terarah (Focus Group Discussion/FGD). Selain itu untuk menyempurnakan penelitian dilengkapi dengan pertanyaan lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan agar jawaban pada kuesioner sebelumnya bisa dijabarkan, tidak terbatas pada pertanyaan tertutup.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka penelitian yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa program reforma sebagai bagian dari *asset reform* yang dikombinasikan dengan *access reform* maka dapat memberikan akses kredit/modal dengan biaya modal yang lebih rendah yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat penerima program. Dalam mengukur pengaruh program tersebut dilakukan analisis secara makro dan mikro. Analisis makro dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang akan diestimasi dengan panel data. Sementara analisis secara mikro dilakukan terhadap 5 provinsi dengan membagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol (bukan penerima program) dan kelompok penerima program. Hasil analisis ini akan menunjukkan berapa besaran pengaruh program strategis dan program strategis yang diikuti dengan program pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Gambar 5

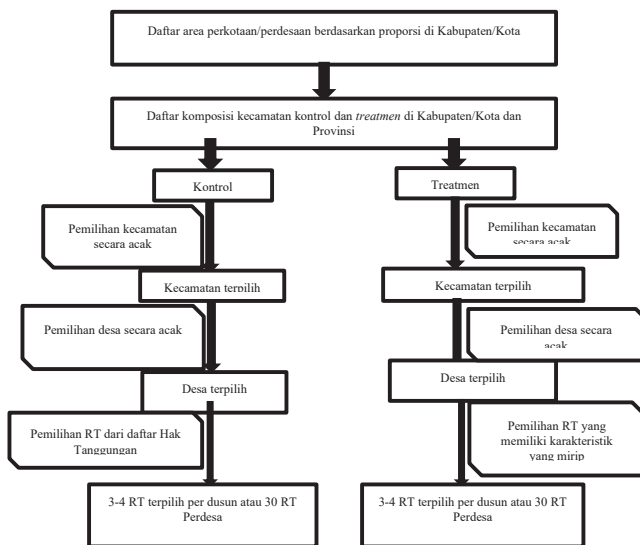
Kerangka Pikir Penelitian



C. Teknik Pemilihan Sampling

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi data primer adalah masyarakat yang sudah menerima program sertifikasi tanah dari program strategis pertanian di 33 provinsi. Sementara data primer akan dilakukan di 5 provinsi diantaranya Provinsi DI. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Teknik pemilihan sampling *purposive* dengan kriteria: lokasi yang dalam satu provinsi terdapat program redistribusi, PTSL dan pemberdayaan, lokasi yang mendapat program prioritas dengan target tertinggi PTSL dan redistribusi. Tahapan dalam pemilihan sampel disajikan pada Gambar 6 berikut,

Gambar 6 Pemilihan Wilayah Sampel Tahapan Pemilihan Sampling



Dari 5 (Lima) provinsi dipilih kabupaten/kota secara proporsional didasarkan pada jumlah sertipikat dan tahun sertipikasi (2017-2018). Selanjutnya dari Kabupaten/Kota akan dipilih kecamatan-kecamatan yang akan dipilih secara *purposive*. Dalam mengidentifikasi kecamatan-kecamatan tersebut dibedakan wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah kecamatan yang dipilih secara *purposive* kelurahan dan desa tertentu sebagai lokasi penelitian

Responden yang diteliti di setiap wilayah dibagi menjadi kelompok *treatment* dan kelompok kontrol (pembanding). Kelompok *treatment* dibagi menjadi dua yaitu kelompok yang menerima program sertipikat dan pemberdayaan dan kelompok yang hanya menerima sertipikat tanpa menerima pemberdayaan. Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak menerima program sertipikasi dan pemberdayaan. Kelompok kontrol diambil dari wilayah permukiman tetangga atau desa tetangga yang memiliki karakteristik yang mirip dengan lokasi penelitian dari segi demografi, ekonomi, dan tata guna tanah. Tujuan dari kelompok kontrol ini agar perubahan-perubahan karena program sertipikasi bisa ditentukan dengan tepat.

Tabel 3
Komponen dan Variabel Penelitian Data Primer

Komponen	Variabel
Identitas responden	Status dalam RT, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pengeluaran RT
Kondisi rumah tangga	Karakteristik rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan rumah
Kondisi bidang tanah	Luas kepemilikan tanah, jumlah bidang tanah, lokasi, pengelolaan, pemanfaatan
Jenis bidang tanah	Perumahan, persawahan, pertanian tanpa irigasi, pertanian dengan irigasi, lain-lain
Nilai tambah bidang tanah	Jenis pemanfaatan, modal yang dibutuhkan, pendapatan yang diperoleh
Pemanfaatan sertipikat sebagai agunan	Besaran pinjaman, asal pinjaman, tujuan pinjaman, nilai tambah produktif
Keinginan atau harapan dari bidang tanah	Kegiatan ekonomi bidang tanah, menyewakan bidang tanah, mengagunkan, memindahtangankan, mempertahankan nilai bidang tanah, meningkatkan nilai bidang tanah

Tabel 4 Data Sekunder

Data Sekunder	Definisi Operasional	Sumber
Realisasi program redistribusi	Jumlah bidang tanah yang telah didistribusikan	Kemen ATR
Realisasi program Prona-PTSL	Jumlah bidang tanah yang diberikan sertipikat prona-PTSL	Kemen ATR
Realisasi program lintas sektor (Pertanian, UKM, Nelayan)	Jumlah bidang tanah yang diberikan sertipikat lintas sektor (Pertanian, UKM dan Nelayan)	Kemen ATR
PDRB sektor pertanian	Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian	BPS
Penyaluran kredit UMKM	Realisasi penyaluran kredit UMKM berdasarkan sektor	OJK/BI
Penyaluran KUR	Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat	Kemenko Perekonomian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pengaruh program strategis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara makro ekonomi dianalisis dengan menggunakan model panel data terhadap 33 provinsi tahun 2015-2019. Model panel data digunakan untuk menganalisis adalah sebagai berikut

Model pengaruh program strategis terhadap peningkatan pendapatan
Persamaan 1: Pengaruh Investasi Terhadap PDRB

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 * \ln PMTB_{it} + \beta_2 * \ln \text{Pembangunan} + \beta_3 * \ln \text{Populasi} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Persamaan 2: Pengaruh Program Strategis Terhadap Investasi

$$\ln PMTB_{it} = \beta_0 + \beta_1 * \ln PDRB_{kapit} + \beta_2 * \ln \text{inklusi}_{it} + \beta_3 * \text{Program}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

di mana

PDRB: pendapatan produk domestik regional bruto provinsi i pada tahun t

PMTB: Investasi provinsi i pada tahun t

Pembangunan: Output per PDRB sektor pertanian provinsi i pada tahun t

Populasi: jumlah penduduk provinsi i pada tahun t

PDRB kap: PDRB perkapita provinsi i pada tahun t

Inklusi: jumlah kredit per kapita provinsi i pada tahun t

Program strategis: realisasi jumlah bidang tanah yang disertifikasi di provinsi i pada tahun t

Sementara analisis regresi berganda dengan menggunakan data primer digunakan model sebagai berikut,

Model Regresi Berganda Pengaruh Program Sertifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan

$$y_i = \alpha_0 + \beta k_i + \sum_k \gamma_k * D_k + \theta_1 * Akses\ Kredit_i + \theta_2 * Program_i + e_i \quad (3.3)$$

dimana:

α adalah konstan

k_i adalah modal yang dimiliki (nilai nominal tanah)

D_k adalah set variabel karakteristik individu atau kelompok

β adalah koefisien modal di mana $1 > a > 0$ dan $a + (1 - a) = 1$

γ adalah koefisien karakteristik individu atau kelompok

θ_1 adalah koefisien status akses kredit

θ_2 adalah koefisien tipe program

e_i adalah *white noise error*

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini merupakan analisis statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, dengan menggunakan bantuan grafik yang berhubungan dengan penelitian. Analisis deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini merupakan gambaran umum masyarakat penerima program strategis di beberapa wilayah sampel. Interpretasi Sumber data primer, terdiri atas hasil wawancara dari para *key informants* dan serta hasil survei implementasi program strategis nasional pertanahan yang dielaborasi dengan sumber data sekunder, terdiri atas berbagai literatur yang berkaitan dengan Reforma Agraria. Teknik Pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi literatur dokumen penerima manfaat dan stakeholders terkait. Teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi data, sumber, metode dan diskusi FGD dilapangan. Teknik analisa ini menjadi jembatan untuk memaknai dan interpretasi relasi yang terjadi terkait pengaruh program strategis pertanahan dengan peningkatan pendapatan

2. Analisis Inferensial

Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pada rancangan studi ekseperimen, pengaruh program dapat diukur dengan membandingkan indikator terukur kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol setelah intervensi program. Mengingat data rumah tangga peserta program sertifikasi dan nonpeserta dikumpulkan pada waktu setelah intervensi, maka diperlukan kelompok pembanding. Untuk melihat perbedaan pengaruh antara kelompok penerima dan bukan penerima program akan digunakan dummy variabel.

Teknik estimasi yang digunakan dengan *Ordinary Least Square* (OLS). Penggunaan metode analisis regresi untuk membentuk model regresi didasari oleh asumsi *error* atau residual yang bersifat *identic*, independen, dan berdistribusi normal, dengan mean bernilai nol dan variansi bernilai tertentu (Maddala, 1992), yaitu σ^2 dinotasikan $\varepsilon_i \sim \text{iidn}(0, \sigma^2)$. Secara visual kondisi $\varepsilon_i \sim \text{iidn}(0, \sigma^2)$ dideteksi menggunakan empat macam plot, yaitu : residual terhadap fit, residual terhadap urutan pelaksanaan eksperimen, histogram residual, dan kenormalan residual. Pada mulanya untuk penaksiran parameter koefisien regresi digunakan metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*, disingkat OLS). Apabila plot residual terhadap fit membentuk titik-titik yang tidak random, tetapi membentuk pola, misal berbentuk corong atau bando lengkung, ini menunjukkan asumsi *identic* tidak terpenuhi. Pada kondisi ini dinamai juga *heteroskedastisitas* (lawannya adalah *homoskedastisitas*). Pada kondisi ini metode penaksiran kuadrat terkecil (OLS) tidak sesuai lagi untuk digunakan.

3. Analisis Panel Data

Metode analisis untuk mengestimasi Persamaan (3.1) dan (3.2) adalah metode analisis data panel, dikarenakan data yang digunakan terdiri dari data *cross-section* 33 provinsi dan data *time series* untuk periode tahun 2015-2019. Dalam analisa model data panel dikenal tiga macam pendekatan estimasi yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least squares*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*).

1. *Pooled least squares (Common Effect Model)*

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan menggabungkan data *time series* dan *cross-section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar

waktu dan individu maka untuk mengestimasi model data panel dapat menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Dalam pendekatan ini tidak memerhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model *Common Effect* ini mengasumsikan bahwa nilai *intercept* individu adalah sama. Model juga mengasumsikan bahwa *slope* adalah identik untuk semua individu.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa *slope* koefisien adalah konstan antar unit *cross-section*. Pendekatan ini dimana *slope coefficients constant* tetapi *intercept varies across individuals*, dalam literatur dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect model/FEM*). Istilah *fixed effect* datang dari kenyataan bahwa walaupun *intercept* mungkin berbeda antar individu, namun *intercept* setiap individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu; dengan kata lain ia adalah *time invariant*. Jika kita menulis *intercept* sebagai α_{it} , ini berarti *intercept* setiap individu adalah *time variant*. Selain itu, seperti terlihat pada persamaan diatas, FEM mengasumsikan bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu.

3. *Random Effect Model* (REM)

Metode *random effect* memasukkan variabel gangguan (*error terms*) dalam estimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. *Random Effect Model* mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel random atau stokastik, dimana sampel individunya dipilih secara random. Karena adanya korelasi antara variabel gangguan dalam persamaan maka teknik OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi *Random Effect Model* adalah *Generalized Least Squares* (GLS).

Perbedaan utama antara FEM dan REM terletak pada perlakuan terhadap *intercept*. Pada FEM setiap unit *cross-section* memiliki nilai *intercept* tersendiri yang *fixed*. Sedangkan pada REM *intercept* merepresentasikan nilai rata-rata dari seluruh *cross-sectional intercept* dan *error component* merepresentasikan deviasi acak *intercept* individu dari nilai *intercept* rata-rata.

BAB 4

GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI

A. Sampel Survei Masyarakat

Survei dilakukan kepada lima kelompok masyarakat untuk mendapatkan informasi pengaruh program strategis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Survei dilakukan di wilayah Banten, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jenis kelamin masyarakat yang disurvei sebagian besar laki-laki. Sebagian besar masyarakat yang disurvei bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lainnya. Sebagian masyarakat yang disurvei sudah mengagunkan sertipikat tanahnya, berpartisipasi pada program pemberdayaan, dan memanfaatkan tanah untuk kegiatan ekonomi.

Tabel 5 Gambaran Sampel Masyarakat

	Baseline	Program Strategis	Pemberdayaan	Total
<i>Asal Provinsi Responden</i>				
Banten	31	48	27	106
DIY	48	91	0	139
Jawa Tengah	41	62	21	124
Jawa Barat	39	87	33	159
Jawa Timur	41	63	18	122
Total	200	351	99	650
<i>Lapangan Pekerjaan Utama</i>				
Pertanian/Perkebunan	70	203	34	307
Peternakan	2	5	0	7
Perikanan	0	6	15	21
Pertambangan dan Peng	0	1	1	2
Industri	42	10	2	54
Listrik, Gas, Air Min	1	2	1	4
Perdagangan	28	28	20	76
Rumah Makan/Restoran	1	0	0	1

	Baseline	Program Strategis	Pemberdayaan	Total
Penyediaan Akomodasi	0	1	0	1
Transportasi dan Perg	2	7	1	10
Komunikasi	1	1	0	2
Jasa Keuangan, real E	6	10	4	20
Jasa Kemasyarakatan,	38	49	8	95
Lainnya	9	42	13	64
Total	200	365	99	664
<i>Kepemilikan Akses Kredit</i>				
Ya	77	169	53	299
Tidak	120	183	40	343
Total	197	352	93	642
<i>Jenis Kegiatan Ekonomi Bidang Tanah</i>				
Non Pertanian, tempat	9	45	10	64
Non Pertanian, bukan	7	15	1	23
Pertanian	45	49	14	108
Lainnya	139	256	74	469
Total	200	365	99	664
<i>Status Penggunaan Sertifikat Tanah</i>				
Sudah	27	151	55	233
Belum/Tidak	173	214	44	431
Total	200	365	99	664

Sumber: Hasil survei lapangan 2020, diolah

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok yang dilakukan survei. Masyarakat yang masuk dalam kelompok *baseline* cenderung memiliki pengeluaran bulanan/tahunan lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan juga terlihat dari rata-rata luas lahan yang dimiliki masyarakat dan nilai tanah. Selain dua indikator tersebut, setiap kelompok relatif memiliki nilai rata-rata yang sama.

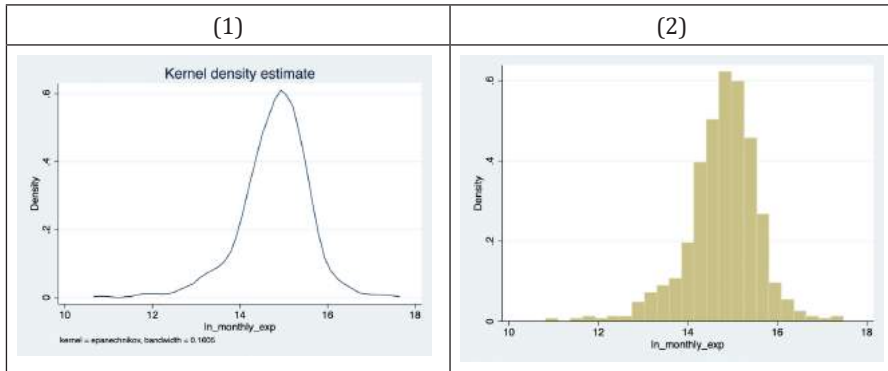
Tabel 6 Statistik Deskriptif Hasil Survei

	Baseline	Program Strategis	Pemberdayaan	Total
<i>Pengeluaran Bulanan RT (Rp)</i>				
Mean	3,449,735	3,858,944	3,861,500	3,736,069
Std. Dev	2,925,274	2,968,958	2,207,536	2,857,206
Freq.	200	365	99	664
<i>Pengeluaran per Kapita Bulanan RT (Rp)</i>				
Mean	993,771	1,071,635	1,138,815	1,057,486
Std. Dev	768,197	766,074	679,769	755,396
Freq.	182	331	85	598
<i>Luas Tanah (M²)</i>				
Mean	896	1,902	1,068	1,491
Std. Dev	1,214	3,781	2,158	3,065
Freq.	188	356	81	625
<i>Nilai Tanah (Rp)</i>				
Mean	88,237	196,200	116,000	152,400
Std. Dev	106,300	603,700	268,400	468,600
Freq.	176	321	75	572

Sumber: Hasil survei lapangan 2020, diolah

Pada gambar berikut terlihat bahwa distribusi variabel yang digunakan untuk melihat peningkatan pendapatan yaitu pengeluaran bulanan memiliki distribusi yang relatif normal. Penggunaan pengeluaran bulanan digunakan karena *timeframe* yang dapat ditangkap menjadi lebih detail, bila dibandingkan tahunan. Selain itu, pengeluaran tahunan merupakan jumlah pengeluaran bulanan selama satu tahun, sehingga tidak mengubah hasil relasi antar variabel.

Gambar 7 Distribusi Variabel Dependen (Pengeluaran Bulanan)



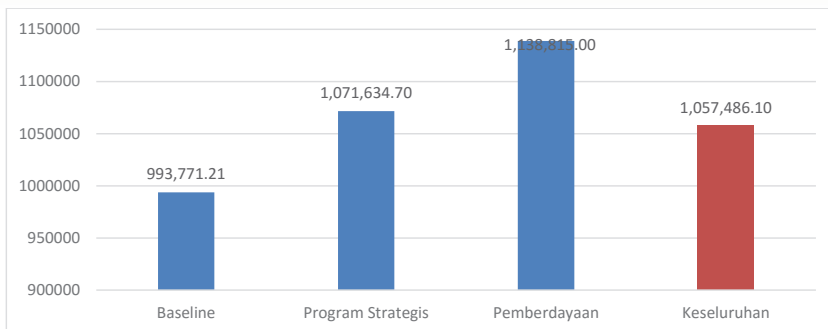
C. Perbedaan Pengeluaran Rumah Tangga Penerima dan Bukan Penerima Program

Responden dalam penelitian ini relatif memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang sama antar kelompok program, sementara perbedaan ini dapat terlihat antar beberapa pengelompokan yaitu partisipasi pelatihan, lapangan pekerjaan utama, kepemilikan akses kredit, penggunaan bidang tanah, tingkat pendidikan, wilayah, dan status penggunaan sertipikat. Kesimpulan ini didukung dengan hasil uji ANOVA antar pengelompokan tersebut.

Tabel 7 Kesimpulan Hasil Uji Beda Rata-rata Pengeluaran Perkapita Antar Kelompok

Pengelompokan	F-Probability	Kesimpulan
Program	0,30	Tidak Berbeda
Partisipasi Pelatihan	0,01	Terdapat Perbedaan
Partisipasi Bantuan Pemasaran	0,28	Tidak Berbeda
Lapangan Pekerjaan Utama	0,01	Terdapat Perbedaan
Kepemilikan Akses Kredit	0,00	Terdapat Perbedaan
Penggunaan Tanah	0,00	Terdapat Perbedaan
Wilayah Survei	0,00	Terdapat Perbedaan
Penggunaan Sertipikat Tanah	0,00	Terdapat Perbedaan
Pendidikan	0,00	Terdapat Perbedaan

Gambar 8 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Program

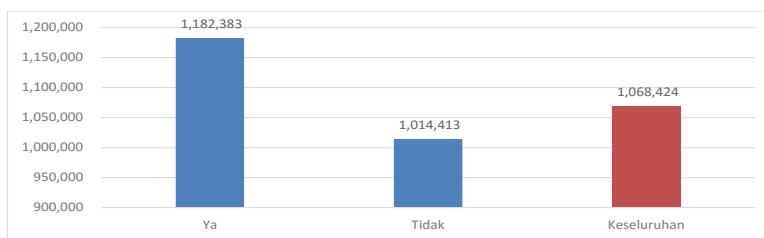


Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	1.3673e+12	2	6.8366e+11	1.20	0.3023
Within groups	3.3929e+14	595	5.7024e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(2) = 1.9730$ Prob> $\chi^2 = 0.373$

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok program terlihat tidak jauh berbeda atau tidak memiliki perbedaan yang nyata, dimana pengeluaran perkapita rumah tangga yang terendah adalah kelompok Baseline (bukan penerima program) sebesar Rp993.771 sedangkan yang tertinggi adalah kelompok pemberdayaan Rp1.138.815. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,30 sehingga perbedaan antar kelompok ini tidak dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 9 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Partisipasi Pelatihan

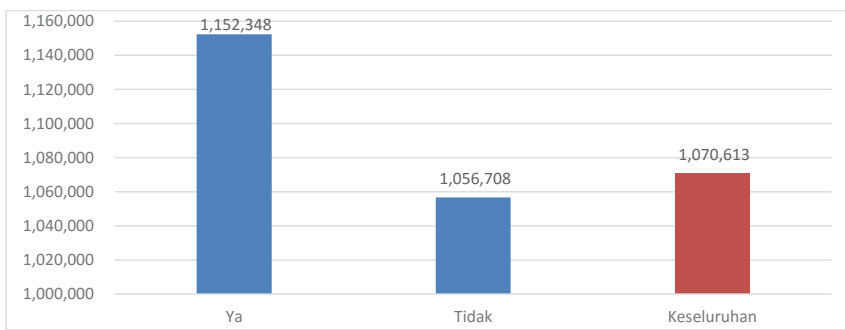


Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	3.4838e+12	1	3.4838e+12	6.20	0.0130
Within groups	3.1666e+14	564	5.6146e+11		
Total	3.2015e+14	565	5.6663e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 15.0483$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang berdasar partisipasi pelatihan terlihat satu kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok yang berpartisipasi dalam pelatihan. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,01 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya. Artinya terdapat perbedaan rumah tangga yang berpartisipasi dalam pelatihan memiliki tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan.

Gambar 10 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Partisipasi Bantuan Pemasaran

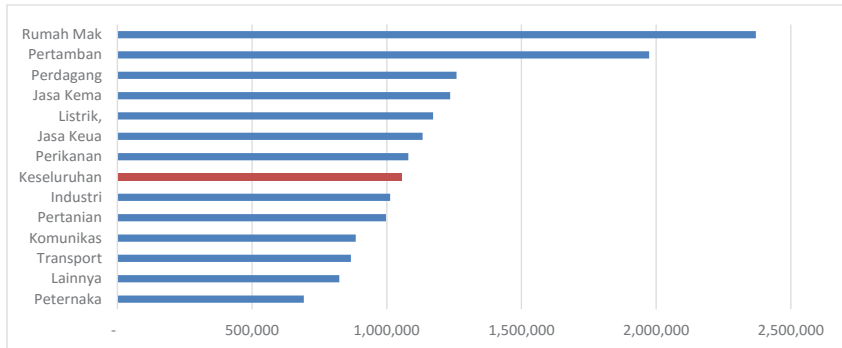


Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	6.4101e+11	1	6.4101e+11	1.13	0.2882
Within groups	3.1872e+14	562	5.6711e+11		
Total	3.1936e+14	563	5.6724e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 33.8870$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari partisipasi pada program bantuan pemasaran terlihat satu kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok yang berpartisipasi, tetapi karena perbedaan ini relatif tidak terlalu besar dengan mempertimbangkan variasi responden maka tidak dapat disimpulkan ada perbedaan. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,28 sehingga perbedaan antar kelompok ini tidak dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 11 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

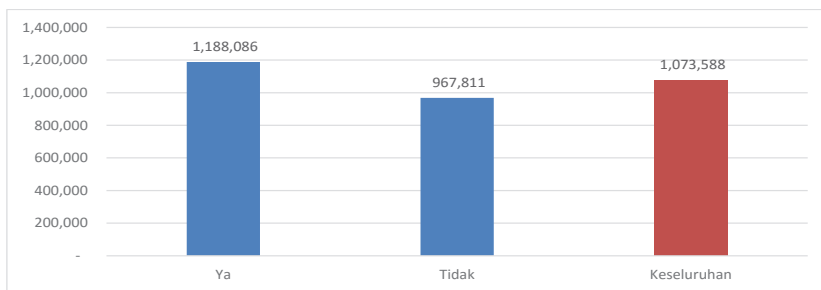


Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	1.4450e+13	12	1.2042e+12	2.16	0.0123
Within groups	3.2621e+14	585	5.5763e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(10) = 144.7258$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari lapangan pekerjaan utama terlihat dua kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok rumah makan dan pertambangan. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,01 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 12 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Akses Kredit

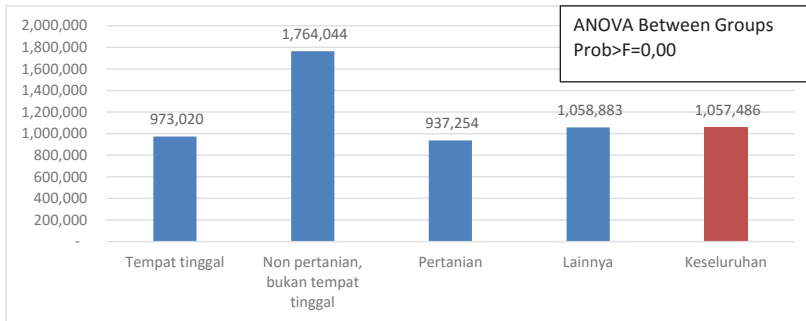


Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	7.0366e+12	1	7.0366e+12	12.49	0.0004
Within groups	3.2624e+14	579	5.6345e+11		
Total	3.3328e+14	580	5.7461e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 56.4919$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

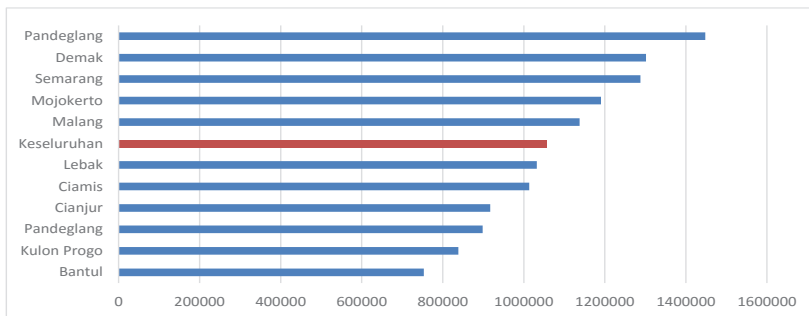
Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari kepemilikan akses kredit terlihat satu kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok yang memiliki akses kredit. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,0004 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 13 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Tanah



Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari penggunaan bidang tanah terlihat satu kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok yang menggunakan bidang tanahnya untuk nonpertanian, bukan tempat tinggal. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,01 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 14 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Wilayah Survei

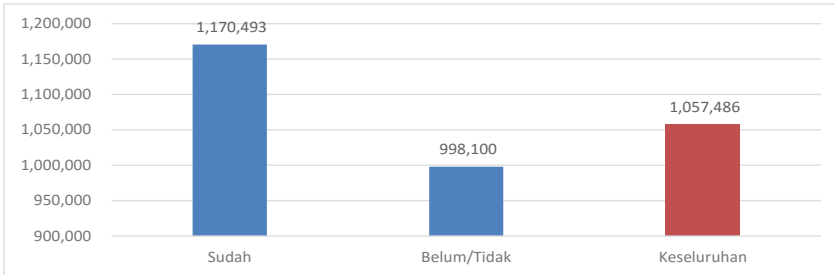


Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	2.0476e+13	11	1.8614e+12	3.41	0.0001
Within groups	3.2019e+14	586	5.4639e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(11) = 179.1682$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari wilayah terlihat perbedaan dimana responden di wilayah Demak memiliki rata-rata yang paling tinggi, sementara yang terendah merupakan responden dari wilayah Bantul. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,01 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 15 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Status Penggunaan Sertipikat

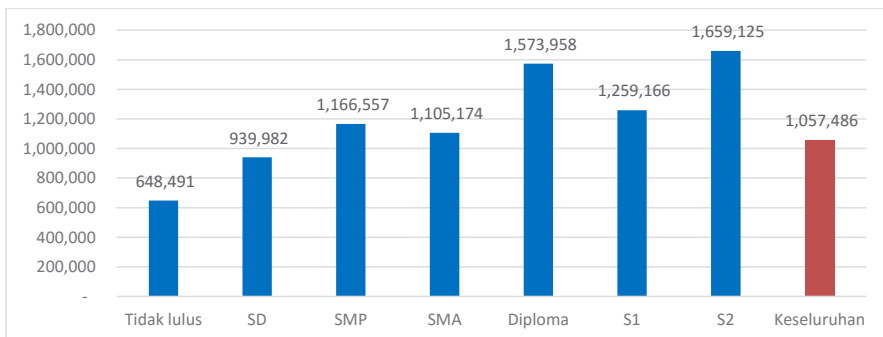


Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	4.0132e+12	1	4.0132e+12	7.10	0.0079
Within groups	3.3665e+14	596	5.6485e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 6.9590$ Prob> $\chi^2 = 0.008$

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga antar kelompok yang didasari penggunaan sertipikat terlihat satu kelompok yang memiliki rata-rata pengeluaran lebih tinggi yaitu kelompok yang sudah menggunakan sertipikat tanahnya. Hasil uji beda rata-rata antar kelompok menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,01 sehingga perbedaan antar kelompok ini dapat disimpulkan nyata adanya.

Gambar 16 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	1.3106e+13	7	1.8723e+12	3.37	0.0015
Within groups	3.2756e+14	590	5.5518e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(6) = 99.2495$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa F-Prob sebesar 0,0015, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara responden berdasarkan tingkat pendidikan. Responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengeluaran yang tinggi pula. Namun untuk pendidikan SMP justru memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan SMA. Begitu juga dengan tingkat pendidikan diploma memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan S1.

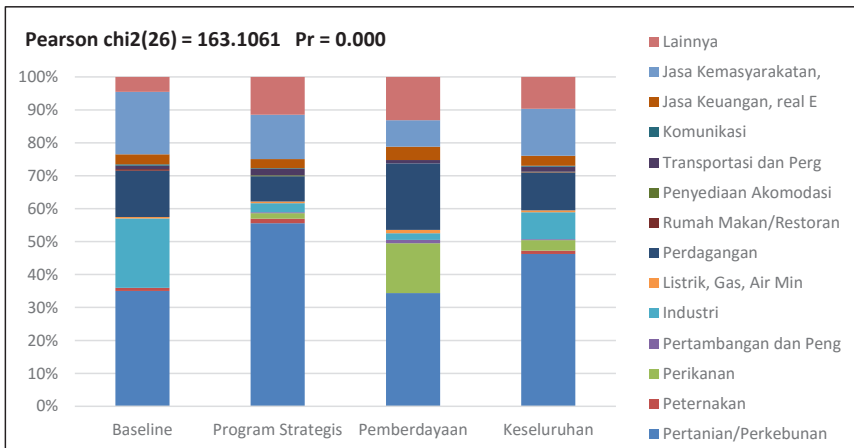
D. Perbedaan Karakteristik Responden Antar Kelompok

Perbedaan karakteristik responden dapat menjadi alasan perbedaan pengeluaran per kapita antar responden, sehingga perbedaan yang bersumber dari program tidak tampak. Pembahasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengeluaran per kapita antar karakteristik responden yang berbeda. Maka dari itu, apabila antar kelompok program memiliki karakteristik yang berbeda maka sumber perbedaan dari program tidak tampak. Hasil uji beda proporsi yang dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan antar kelompok program beberapa karakteristik yang dilihat. Kesimpulan ini dilihat dari nilai probabilitas uji yang di bawah 0,05 untuk semua pengelompokan yang dipakai. Maka dari itu, perlu memasukkan karakteristik ini dalam menjelaskan perbedaan pengeluaran per kapita responden.

Tabel 8 Kesimpulan Hasil Uji Beda Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Antar Pengelompokan

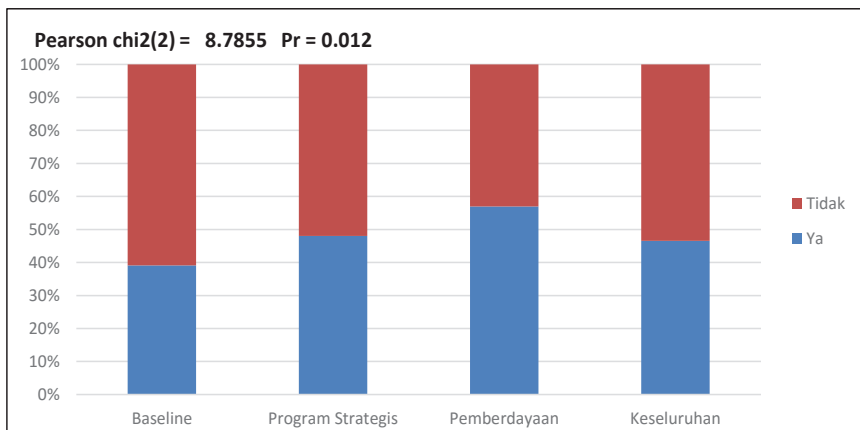
Pengelompokan	Probability	Kesimpulan
Lapangan Pekerjaan Utama	0,00	Terdapat Perbedaan
Kepemilikan Akses Kredit	0,00	Terdapat Perbedaan
Penggunaan Tanah	0,00	Terdapat Perbedaan
Wilayah Survei	0,00	Terdapat Perbedaan
Penggunaan Sertifikat Tanah	0,00	Terdapat Perbedaan

Gambar 17 Komposisi Lapangan Pekerjaan Utama Antar Kelompok Program



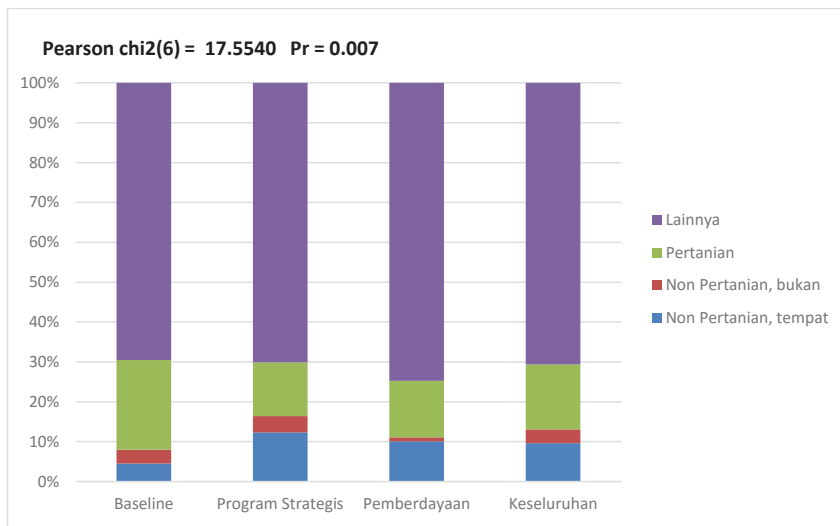
Terdapat perbedaan nyata lapangan pekerjaan antar kelompok program. Mayoritas semua kelompok bekerja di sektor pertanian, kemudian diikuti dengan sektor perdagangan.

Gambar 18 Komposisi Kepemilikan Akses Kredit Antar Kelompok Program



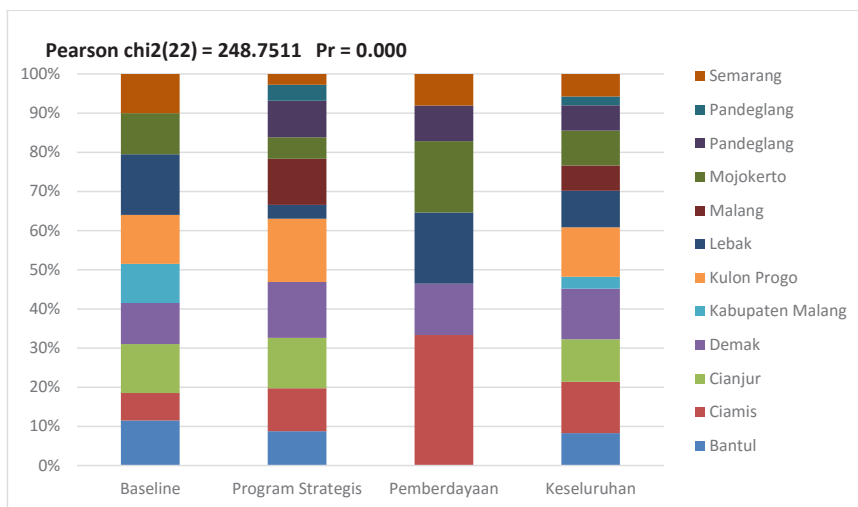
Terdapat perbedaan akses kredit antar kelompok program. Kelompok pemberdayaan memiliki akses kredit yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok *baseline* (bukan penerima program). Begitu juga dengan kelompok penerima program strategis memiliki akses kredit yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok *baseline* (bukan penerima program).

Gambar 19 Komposisi Penggunaan Tanah Obyek Survei Antar Kelompok Program



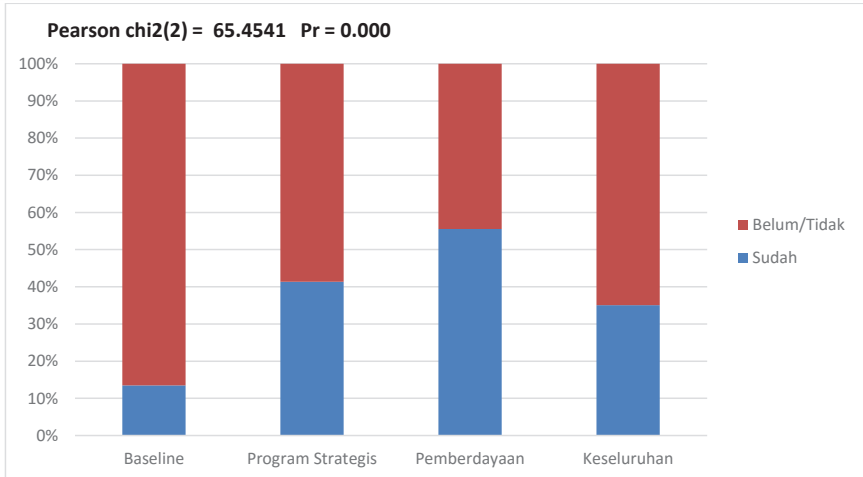
Terdapat perbedaan nyata dalam penggunaan tanah obyek survey antar kelompok program. Mayoritas tanah digunakan untuk sektor pertanian.

Gambar 20 Komposisi Wilayah Antar Kelompok Program



Terdapat perbedaan nyata komposisi wilayah survei. Kelompok pemberdayaan lebih banyak di wilayah Ciamis, sementara kelompok program strategis lebih banyak di wilayah Kulon Progo.

Gambar 21 Komposisi Penggunaan Sertipikat Tanah Antar Kelompok Program

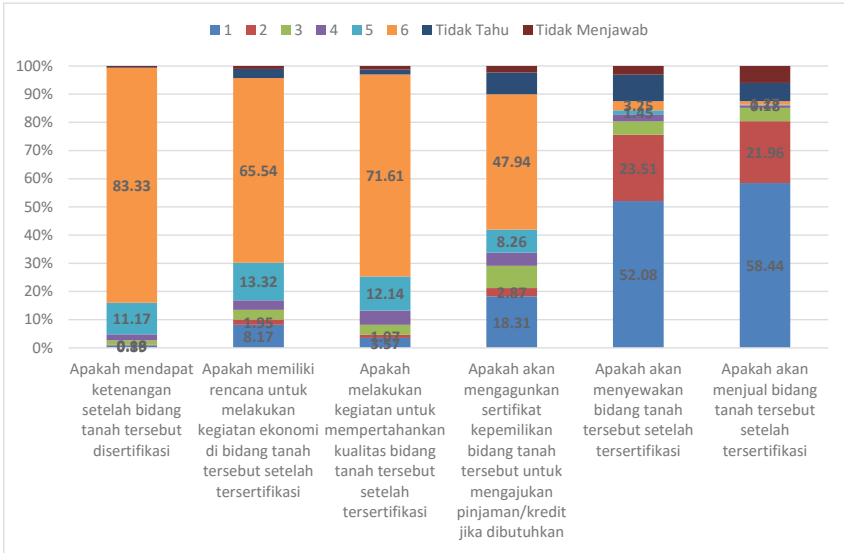


Terdapat perbedaan nyata dalam penggunaan sertipikat tanah. Penerima program strategis yang disertai dengan pemberdayaan sudah memanfaatkan sertipikat tanah dibandingkan dengan kelompok bukan penerima program, begitu juga dengan kelompok penerima program strategis juga sudah memanfaatkan sertipikat tanah dibandingkan bukan penerima program.

E. Persepsi Masyarakat Penerima Program Terhadap Manfaat Program Sertipikasi Tanah

Mayoritas responden yang menerima program strategis merasakan ketenangan setelah tanahnya disertipikasi yaitu sebanyak 83 persen responden. Responden yang menerima program juga memiliki rencana untuk melakukan kegiatan ekonomi di bidang tanah yang sudah disertipikasi (sebanyak 65% responden). Ketenangan tanahnya sudah tersertipikasi masyarakat penerima program juga akan melakukan kegiatan untuk mempertahankan kualitas tanah yang sudah tersertipikasi (sebanyak 71% responden). Namun responden yang sudah mendapatkan program strategis yang akan mengagunkan sertipikatnya untuk mengajukan kredit hanya sebanyak 47,9 persen responden. Sementara untuk menjual dan menyewakan tanahnya, mayoritas responden tidak akan menjual dan menyewakan tanah yang sudah tersertipikasi yaitu masing-masing sebanyak 58 persen responden dan 52 persen responden.

Gambar 22 Pendapat Mengenai Kebermanfaatan Program Sertifikasi Tanah yang Sudah Diterima (1-6, semakin tinggi semakin setuju)



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Menggunakan Data Sekunder

Hasil estimasi dengan menggunakan data sekunder ini digunakan untuk melihat pengaruh program strategis secara makro. Hasil estimasi menunjukkan kedua model dapat menjelaskan variasi dari masing-masing variabel dependen dan mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi. Hasil estimasi persamaan (1) memiliki nilai probabilitas F sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, variasi yang dapat dijelaskan sebanyak 98% yang ditunjukkan dari nilai R-square. Persamaan (2) juga memiliki nilai probabilitas F sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, variasi yang dapat dijelaskan sebanyak 56% yang ditunjukkan dari nilai R-square.

Tabel 9 R-Square Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Sekunder

Persamaan	Obs	R-Sq	F-Prob
(1)	132	0,98	0,00
(2)	132	0,56	0,00

Hasil estimasi persamaan (1) menunjukkan bahwa investasi (PMTB), jumlah penduduk dan tingkat pembangunan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan daerah (PDRB). Jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi yaitu dengan 1 persen jumlah penduduk yang lebih tinggi maka kegiatan ekonomi lebih tinggi sebesar 0,42 persen. Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi yaitu dengan 1 persen PMTB yang lebih tinggi maka kegiatan ekonomi lebih tinggi sebesar 0,87 persen. Level pembangunan secara signifikan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan hubungan yang positif sebesar 0,10 persen.

Hasil Estimasi persamaan (2) menunjukkan bahwa pendapatan, tingkat inklusi, dan program sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat investasi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi program strategis yang lebih tinggi sebesar 1% akan menghasilkan investasi yang lebih tinggi sebesar 0,58%. Pendapatan per kapita masyarakat memiliki hubungan positif dengan PMTB. Program Strategis memiliki hubungan positif signifikan dengan PMTB walaupun nilainya kecil yaitu 1 persen jumlah sertipikasi yang lebih tinggi menyumbang peningkatan PMTB sebanyak 0,002 persen.

Tabel 10 Hasil Estimasi Pengaruh Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Sekunder

	Koefisien	t	P> t
Persamaan (1)			
	0,87***	4,19	0,00
	0,42***	22,70	0,00
	0,10***	3,37	0,00
	3,93***	7,60	0,00
Persamaan (2)			
	1,34***	5,83	0,00
	-1,48***	-5,72	0,00
	0,58*	12,25	0,00
	2,91*	2,64	0,00

* Signifikan pada tingkat signifikansi 10%

** signifikansi pada tingkat signifikansi 5%

**** signifikansi pada tingkat signifikansi 1%

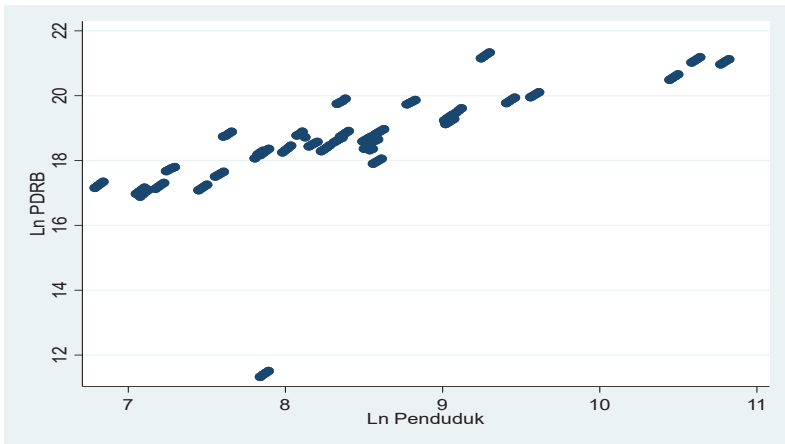
Tabel 11 dapat dijelaskan Program Sertipikasi Tanah dan Investasi (PMTB) dalam Perspektif Makro berdasar analisis Model Regresi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi yaitu dengan 1 persen jumlah penduduk yang lebih tinggi maka kegiatan ekonomi lebih tinggi sebesar 0,42 persen.
2. Penanaman Modal Tetap **Bruto** (PMTB) memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi yaitu dengan 1 persen PMTB yang lebih tinggi maka kegiatan ekonomi lebih tinggi sebesar 0,87 persen.
3. level pembangunan secara signifikan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan hubungan yang positif.

4. pendapatan per kapita masyarakat memiliki hubungan positif dengan PMTB
5. program strategis memiliki hubungan positif signifikan dengan PMTB walaupun nilainya kecil yaitu 1 persen jumlah sertifikasi yang lebih tinggi menyumbang peningkatan PMTB sebanyak 0,002 persen.
6. indikator inklusi keuangan juga memiliki peran positif signifikan dalam menentukan PMTB.

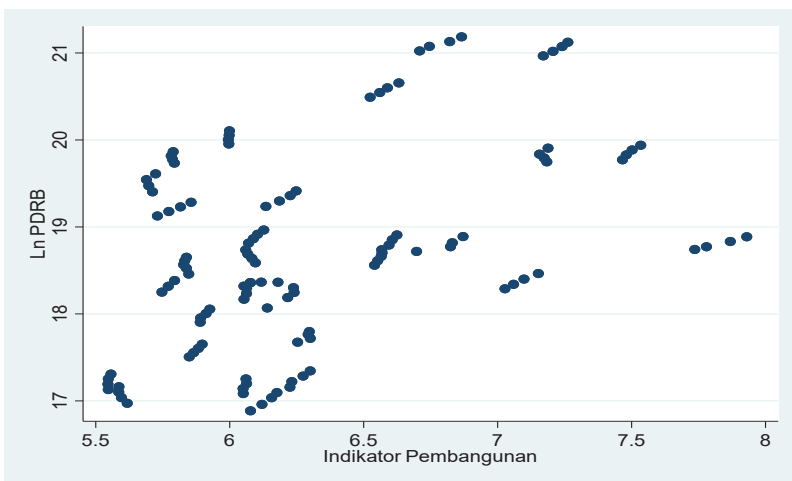
Gambar 23 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Penduduk

Relasi jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi

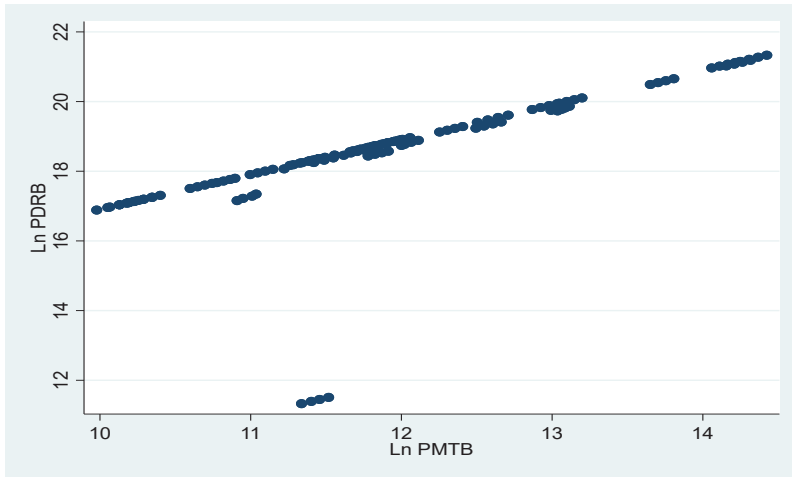


Gambar 24 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indikator Pembangunan (Output/PDB Pertanian)

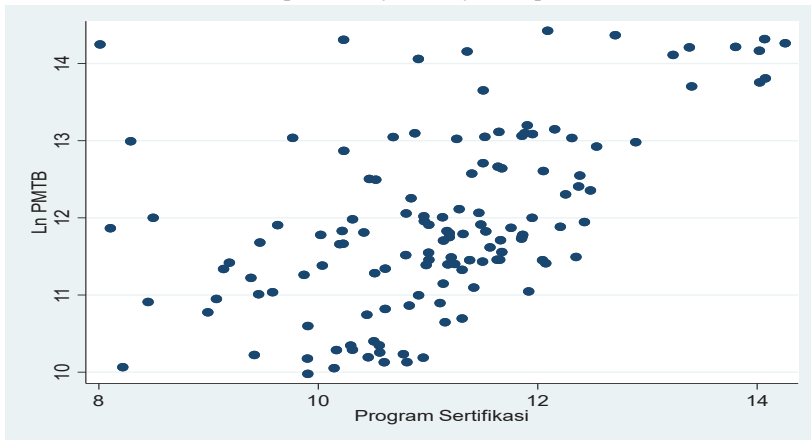
level pembangunan secara signifikan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan hubungan yang positif



Gambar 25 Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
jumlah penduduk memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi



Gambar 26 Jumlah Sertifikasi vs Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB)
program strategis memiliki hubungan positif signifikan dengan PMTB walaupun nilainya kecil yaitu 1 persen



*)Pada tabel 23- 26 analisis korelasinya ada pada poin 1-6 tersebut tabel tersebut hanya menampilkan polanya regresinya dari aplikasi stata.

Berdasarkan analisis tersebut maka untuk menaikkan PMTB lebih dari 0,002 maka kementerian ATR/BPN perlu melakukan intervensi terkait pemanfaatan akses ekonomi dengan basis data pemanfaatan sertifikat tanah program strategis untuk kegiatan produktif ekonomi. Produktifitas ekonomi disini di utamakan adalah penjaminan sertifikat untuk kredit usaha. Adanya

sertipikat tanah membuat kalangan perbankan akan lebih leluasa dan mudah memberikan kredit kepada masyarakat. Secara makro di Indonesia sendiri, menurut Otoritas Jasa Keuangan per-November 2020²⁶ terdapat peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Indek literasi keuangan di Indonesia memang belum bisa dikatakan baik, baru mencapai 38%, sedangkan indek inklusi keuangan mencapai 76,19%. Sosialisasi dan fasilitasi pemberian kredit usaha mikro/kecil/menengah dengan jaminan sertipikat yang tercatat dan terekam secara baik adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kementerian. Bila merujuk pada data statistik pertanahan yang diakses di <https://statistik.atrbpn.go.id/HakTanggung> maka tercatat secara resmi terdapat 6.632.351 sertipikat dengan total nominal 6.919 triliun²⁷. Dari data makro ini yang perlu dilakukan oleh kementerian untuk melakukan verifikasi resmi dengan pihak perbankan pemerintah maupun swasta nasional. Kondisi ini penting supaya pemanfaatan sertipikat tanpa hak tanggungan ini termonitor secara sistematis dan besaran perputaran ekonominya. Konteks seperti ini perbankan memiliki peranan subyektif dalam memberikan kredit tanpa hak tanggungan ke masyarakat sementara agunannya tetap sertipikat. Apabila dibandingkan dengan data penyaluran KUR maka perlu diklarifikasi dari lembaga keuangan (perbankan) dimana penyaluran kredit usaha rakyat sampai pada akhir 2020 mencapai 151 triliun rupiah atau terserap 68, 77 persen dari target 190 triliun rupiah. Dengan jumlah debitur sejumlah 4.650.162²⁸. Berdasarkan data statistik pertanahan tersebut maka upaya yang bisa dilakukan oleh Kementerian ATRBPN dengan mengkonfirmasi kepada pihak perbankan nasional berapa total nominal kredit yang dilakukan oleh masyarakat dengan jaminan sertipikat. Sehingga konfirmasi ini bisa menguatkan bahwa kebijakan nasional sertipikasi tanah ini membawa pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan untuk pengembangan usaha yang bermuara pada peningkatan pendapatan.

B. Hasil Estimasi Dampak Program Sertipikasi Tanah Menggunakan Data Primer

Hasil estimasi ini dilakukan dengan menggunakan data primer hasil survei, tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel dan melihat

26 Diakses dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/od9foh383/menko-perekonomian-inklusi-keuangan-dimulai-dari-sertifikasi-tanah> diakses tanggal 2 februari pukul 12.32

27 Data aplikasi <https://statistik.atrbpn.go.id/HakTanggung>

28 Diakses dari website http://www.kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2020/12 diakses pada 27 desember 2020 pukul 11.30

pengaruh program strategis terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang didekati (proksi) dengan pengeluaran responden.

1. Sumber Perbedaan Pengeluaran Per Kapita dari Perbedaan Karakteristik Rumah Tangga

Karakteristik yang diduga menjadi sumber perbedaan pengeluaran per kapita rumah tangga yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu nilai tanah, jenis kegiatan ekonomi bidang tanah, perbedaan wilayah, dan kepemilikan akses kredit. Karakteristik ini dimasukkan dalam model estimasi pengaruh program strategis untuk menjadi variabel penjelas perbedaan pengeluaran per kapita masyarakat selain yang berasal dari program strategis. Berikut adalah penjelasan masing-masing pengaruh karakteristik tersebut terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga.

Nilai tanah dapat menjelaskan besarnya pengeluaran masyarakat dikarenakan tanah yang nilainya lebih tinggi umumnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dengan hasil yang lebih tinggi. Kepemilikan tanah dengan nilai yang semakin tinggi mengizinkan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan selanjutnya meningkatkan utilitas atau tingkat kesejahteraan. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa rumah yang memiliki tanah dengan nilai yang lebih tinggi sebesar 1% cenderung memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi sebesar 0.05% dengan 95% rentang keyakinan di antara 0,01% hingga 0,08%. Hasil ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki tanah dengan nilai yang lebih tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita yang lebih tinggi.

Perbedaan lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga dapat menjadi sumber perbedaan pengeluaran per kapita responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan ini nyata adanya. Kesimpulan ini didukung dengan beberapa lapangan pekerjaan yang rata-rata pengeluaran per kapitanya lebih tinggi dibandingkan yang lapangan pekerjaannya di bidang pertanian yaitu kepala rumah tangga yang bekerja di sektor listrik, gas, air minum; perdagangan; rumah makan/restoran; serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sementara itu, responden yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor lainnya relatif memiliki pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan yang bekerja di sektor pertanian.

Akses kredit merupakan salah satu faktor yang dapat menggerakkan rumah tangga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatannya, tetapi hasil penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rumah tangga yang memiliki akses kredit dan tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya hanya sebesar 3 persen dengan variasi yang cukup besar sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perbedaan ini nyata adanya.

Jenis kegiatan ekonomi pada objek tanah dapat mempengaruhi seberapa besar hasil yang didapatkan oleh rumah tangga sehingga pada akhirnya memengaruhi berapa banyak yang bisa rumah tangga keluarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang menggunakan tanah yang dimiliki untuk kegiatan nonpertanian sebagai bukan tempat tinggal memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang menggunakan tanahnya untuk tempat tinggal masing-masing lebih tinggi, sementara rumah tangga yang menggunakan bidang tanahnya untuk pertanian dan lainnya tidak berbeda dengan rumah tangga menggunakan bidang tanahnya untuk tempat tinggal.

Perbedaan wilayah dapat menjadi sumber perbedaan pendapatan masyarakat dikarenakan setiap wilayah memiliki tingkat ekonomi atau tingkat harga yang berbeda, sehingga menyebabkan dapat terjadi perbedaan pendapatan dan pengeluaran masyarakat di setiap wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten/Kota memiliki rata-rata pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai *baseline*, kecuali Kabupaten Kulon Progo, Lebak, dan Pandeglang.

Status penggunaan sertipikat tanah merupakan salah satu faktor yang dapat mengizinkan rumah tangga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatannya melalui akses ke pinjaman, tetapi hasil penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rumah tangga yang menggunakan sertipikat tanahnya dengan yang belum/tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya hanya sebesar 2 persen dengan variasi yang cukup besar sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perbedaan ini nyata adanya. Fakta ini juga diperkuat dengan banyaknya masyarakat yang mengakses kredit dari bank yang tidak terdeteksi oleh KKP dikarenakan tidak melalui hak tanggungan dimana jumlahnya signifikan Survei pada pandemi ini juga memberikan kita pelajaran bahwa salah satu aspek

bahwa kontak personal identitas (*handphone*) menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat penerima program, sayangnya aplikasi KKP tidak tersimpan secara keseluruhan. Mengingat besarnya jumlah produk (sertipikat) yang dihasilkan oleh kementerian ATR/BPN per tahun mungkin proses penghitungan pengaruh dan dampak sertifikasi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan maka perlu pencatatan ke dalam sensus ekonomi dan sosial penerima program sertifikasi yang terintegrasi dengan BPS. Sebab sampling yang diuraikan dari penelitian ini masih perlu dikembangkan jumlah kuantitasnya layaknya sampling secara periodik sebagaimana sensus ekonomi dan sosial di Indonesia sehingga lebih menggambarkan secara makro di Indonesia secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini kami merekomendasikan beberapa alternatif pertanyaan yang bisa dititipkan ke BPS saat melakukan sensus sosial dan ekonomi secara periodik antara lain:

Tabel 11 Opsi untuk dimasukkan dalam Sensus Ekonomi dan Sosial

No	Opsi Tambahan			
1	data K1 sertipikat tanah menjadi lebih akurat dampaknya lokasi desa kategori apa	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal
2	Setelah mendapat sertipikat akan dilakukan apa	Pinjaman produktif	Pinjaman Konsumtif	Sementara belum
3	Apakah desa di lokasi peserta program ada komoditas unggulan	Sudah ada	Belum ada	Sedang dirintis
4	Mendapat info program strategis dari mana	Iklan kementerian	Aparat ATR/BPN	Aparat Desa
5.	Bidang tanah saudara dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi	Ya	Tidak	Akan dicoba
6	Berapa luas tanah saudara miliki	Puluhan meter	Ratusan meter	Lebih dari ratusan
7	Bagaimana anda mendapatkan tanah	Waris	Jual / Beli	Hibah
8	Yakinkah anda sertipikat tersebut bisa menambah modal usaha anda	Ya	Tidak	Belum tahu
9	Bila sudah menjaminkan sertipikat apakah ada peningkatan penghasilan dari usaha anda	Ya	Belum optimal	Tidak

No	Opsi Tambahan			
10	Adakah kegiatan pemberdayaan dari instansi pemerintah di desa anda	Ya	tidak	Sedang dirintis
11	Kesulitan anda saat memulai kegiatan ekonomi	Modal	Akses pasar	Keduanya
12	Tahukah anda tentang nilai tanah saudara	Ya	Tidak	Tidak mengerti
13	Jenis Usaha anda	Pertanian	Non pertanian	Kedua nya
14	Mata pencaharian utama	Wirausaha	Kary Swasta	ASN/PNS/ TNIPOLRI
15	Jarak tanah ke pusat ekonomi/ pemerintahan	Dekat	Sedang	Jauh
16	Kondisi dan Akses Jalan Utama	Baik	Sedang	Kurang Baik
16	Seberapa sering anda mengakses layanan perbankan	Sering	Jarang	Tidak pernah
17	Pernah kah mengakses layanan pertanahan	Sering	Jarang	Tidak pernah
18	Persepsi anda tentang program sertipikasi tanah	Senang	Kurang	Acuh

*) estimasi setiap program strategis diletakkan di desa dengan 3 kategori maju, berkembang, dan tertinggal

Berdasarkan opsi tersebut perlu diperhatikan adalah masyarakat secara pasti hanya mengenali program sertipikasi tanah layaknya PRONA dan PTSL sehingga adapun redistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan BPN belum sepenuhnya mengetahui, mereka kenalnya sertipikasi tanah. Berkaca hal tersebut maka keberlanjutan pemanfaatan sertipikat untuk peningkatan akses ekonomi, permodalan, dan peningkatan usaha lainnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah lainnya untuk menjadikan lokasi desa yang mendapatkan program strategis dijadikan referensi apabila ada program yang sifatnya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis desa. Berdasarkan tabel tersebut perlu dilakukan upaya yang berfokus pada penggolongan program strategis berbasis desa sehingga secara umum akan mengetahui bahwa proporsi program strategis pertanahan ada di desa maju, berkembang, atau tertinggal.

2. Pengaruh Program Strategis dan Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Bagian ini bermaksud menjelaskan hasil penelitian pengaruh program strategis terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Untuk mengetahui pendapatan per kapita masyarakat digunakan proksi pengeluaran per kapita masyarakat yaitu dengan menggunakan informasi pengeluaran per kapita masyarakat antar kelompok yang berbeda yaitu kelompok *baseline* (bukan penerima program) dan berbagai kelompok masyarakat yang mendapatkan program strategis. Penelitian ini berusaha mencari seberapa besar perbedaan pengeluaran per kapita masyarakat antar kelompok tersebut yang bersumber dari program strategis dengan cara melihat perbedaan antar kelompok masyarakat tersebut yang memiliki karakteristik mirip. Artinya penelitian ini berusaha menjawab berapakah normalnya pengeluaran rumah tangga dengan karakteristik yang sama dan melihat apakah ada perbedaan ketika rumah tangga mendapatkan program strategis. Misalnya rumah tangga yang memiliki luas tanah pertanian 300m² dan bekerja sebagai petani normalnya memiliki pengeluaran bulanan sebesar Rp. 2.000.000 sedangkan rumah tangga dengan karakteristik yang sama dan mendapatkan program strategis pengeluaran bulannya sebesar Rp. 2.200.000, maka dapat disimpulkan bahwa program strategis ini dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 200.000.

Tabel 12 Hasil Estimasi Pengaruh Program Strategis dan Pemberdayaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Per kapita Masyarakat

Variabel	Koefisien	P> t
Ln (Nilai Tanah)	0.05**	0.00
Dummy Akses Kredit (<i>Baseline: Ya</i>)		
Tidak	-0.02	0.72
Dummy Penggunaan Bidang Tanah (<i>Baseline: Non Pertanian, tempat tinggal</i>)		
Non Pertanian, bukan tempat tinggal	0.40***	0.00
Pertanian	0.02	0.86
Lainnya	0.02	0.84
Dummy Penggunaan Sertifikat (<i>Baseline: Ya</i>)		

Variabel	Koefisien	P> t
Belum/Tidak	0.02	0.77
Dummy Program (Baseline: Kelompok Baseline)		
Program Strategis	0.18***	0.00
Pemberdayaan	0.15*	0.09
Konstanta	12.29***	0.00

Sumber: Hasil estimasi tahun 2020

Merujuk Tabel di atas dapat di jelaskan dimana Program strategis dapat meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat melalui terbukanya peluang meningkatkan aset usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses kredit. Program strategis ini baru terlihat dapat meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat setelah masyarakat menggunakannya dan untuk meningkatkan akses usahanya melalui akses kredit sehingga pendapatan usahanya dapat meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan program strategis memiliki pengeluaran per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok *baseline* yaitu kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan program strategis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang mendapatkan program strategis memiliki pengeluaran per kapita (pendapatan per kapita) yang lebih tinggi sebesar 18 persen dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang tidak mendapatkan program strategis. Kondisi ini menunjukan bahwa rumah tangga yang mendapatkan program strategis akan merasa lebih tenang dan ada kepastian hukum (legalisasi aset) sehingga mereka dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk memulai usaha atau meningkatkan pemanfaatan dari tanah tersebut dan juga menggunakan sertipikat yang sudah diterima untuk melakukan pinjaman untuk pengembangan modal usaha baik sektor pertanian dan nonpertanian. Pemanfaatan ini akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga per kapita dalam hal ini dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Program strategis yang diikuti dengan pemberdayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat. Kelompok rumah tangga yang mendapatkan program strategis dan pemberdayaan dapat meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat (pendapatan per kapita) sebesar 15 persen dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang tidak mendapatkan

program strategis. Namun dibandingkan dengan kelompok penerima program strategis yang tidak mendapatkan pemberdayaan pengaruhnya lebih kecil. Dalam penelitian ini pemberdayaan tidak memiliki pengaruh yang lebih besar seperti yang seharusnya. Ada beberapa kemungkinan kenapa pemberdayaan ini tidak memiliki pengaruh yang lebih besar diantaranya:

1. Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan organisasi/penguatan kelembagaan, infrastruktur, pembinaan, pelatihan, fasilitasi perdagangan dan pendampingan, permodalan, interkoneksi dengan dunia usaha/kemitraan dan pemasaran/tata niaga. Jika konsep pemberdayaan ini terimplementasi pada masyarakat penerima program strategis maka akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengeluaran perkapita masyarakat (pendapatan). Namun data atau wilayah responden yang disurvei dalam penelitian ini tidak dapat mencakup konsep pemberdayaan yang seharusnya sehingga pengaruh dari pemberdayaan tidak dapat lebih tinggi.
2. Pemberdayaan yang ada di wilayah survei hanya berupa pelatihan dan tidak bersifat berkelanjutan/*sustainable* sehingga tidak memberikan pengaruh yang lebih besar.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran per kapita masyarakat (pendapatan). Semakin tinggi nilai tanah yang dimiliki maka pengeluaran rumah tangga per kapita masyarakat juga akan lebih tinggi. Tanah yang sudah ada legalisasi (sertipikat) maka nilai tanah akan semakin tinggi. Selain itu pemanfaatan atau penggunaan nilai tanah untuk nonpertanian, bukan tempat tinggal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat (pendapatan) sebesar 40%. Tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk usaha seperti toko, pabrik atau industri memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara akses kredit dan penggunaan sertipikat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran per kapita masyarakat (pendapatan).

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Secara makro, ditingkat provinsi program strategis mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi (PMTB) dan investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah (PDRB). Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan positif signifikan dengan kegiatan ekonomi yaitu dengan 1 persen PMTB yang lebih tinggi maka kegiatan ekonomi lebih tinggi sebesar 0,87 persen maksudnya program strategis kementerian ATR/BPN memiliki hubungan positif signifikan dengan PMTB walaupun nilainya kecil yaitu 1 persen jumlah sertipikasi tanah yang lebih tinggi menyumbang peningkatan PMTB sebanyak 0,002 persen.
2. Program strategis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran, rumah tangga yang menerima program strategis memiliki pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima program strategis. Penerima program strategis memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi sebesar 18 persen dibandingkan dengan rumah tangga bukan penerima program. Program strategis yang diikuti dengan pemberdayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran. Penerima program strategis dengan pemberdayaan memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi sebesar 15 persen dibandingkan dengan rumah tangga bukan penerima program. Perbedaan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemberdayaan yang sekedar pelatihan dan pemberian bimbingan teknis sebab masyarakat penerima program berharap lebih dari hal tersebut

Rekomendasi

1. Supaya program strategis sertipikasi tanah lebih tinggi menyumbang peningkatan PMTB sebanyak 0,002 persen maka perlu melakukan intervensi terkait pemanfaatan akses ekonomi dengan basis data pemanfaatan sertipikat tanah program strategis untuk kegiatan produktif ekonomi. Produktifitas ekonomi disini di utamakan adalah penjaminan sertipikat untuk kredit usaha. Sosialisasi dan fasilitasi pemberian kredit

usaha mikro/kecil/menegah dengan jaminan sertipikat yang tercatat dan terekam secara baik adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kementerian.

2. Program strategis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengeluaran, penerima program strategis memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi sebesar 18 persen. Untuk meningkatkan angka ini secara sistematis maka perlu di susun langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. direktorat teknis (Tim GTRA)/Kantor Pertanahan perlu melakukan analisis sosial ekonomi dasar dengan basis desa di lokasi program strategis, yang memiliki fungsi gambaran umum potensi sosial dan ekonomi;
 - b. klusterisasi lokasi program strategis berdasarkan kualitas capaian, dengan harapan adanya monev secara berkala, sehingga progres yang berjenjang ini memudahkan kita melihat indikator dampak secara signifikan;
 - c. lokasi prioritas ini perlu diskenariokan dengan pendekatan holistik dimana didukung segenap unsur pemerintah/swasta, animo partisipasi masyarakat yang baik, dan diawasi secara bersama;
 - d. perlunya penetapan lokasi program PTSL, Redistribusi dan Pemberdayaan yang dijadikan *pilot project* dengan target peningkatan pendapatan signifikan dengan treatment tertentu;
 - e. disepakati pula berapa lama waktu melakukan evaluasi dan penilaian dalam pencapaian target yang diinginkan;
 - f. bila memungkinkan perlu memfokuskan anggaran untuk programs strategis ke desa-desa dengan pertimbangan tertentu sehingga hasilnya signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, G.N. (2016). Jokowi Warns of Illegal Levies in Land Certification. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/17/jokowi-warns-of-illegal-levies-in-landcertification.html>. diakses tanggal 16 maret 2020
- Agustin, Nur K, Julia F Sinuraya, and Sahat M Pasaribu. 2007. "Sertifikasi Lahan Pertanian Mendorong Peningkatan Produksi Pangan "kementerian Pertanian.
- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agroekonomi. Vol 23,2 Desember 2005 : 132-147
- Bachriadi dan Wiradi, G. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018," Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)", Buku Laporan Hasil Survei Seri A1, Katalog BPS 5101018.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018," Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)", Buku Laporan Hasil Survei Seri A2, Katalog BPS 5101019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018," Sampling Error Estimasi Hasil Survei Pertanian antar Sensus (SUTAS)", Buku Laporan Hasil Survei Seri A3, Katalog BPS 1306047.
- Bourguignon, Francois. (2000). Can Redistribution Accelerate Growth and Development?. *Revue d'Economie du Developpement*. 101.
- Bradstock, 2006," Land reform and livelihoods in South Africa's Northern Cape province", Elsevier. 247-259. www.elsevier.com/locate/landusepol.
- Chin, C. (2016). How Can Indonesia Solve Its Massive Backlog of Land Certificates. Retrieved from <https://govinsider.asia/innovation/how-can-indonesia-solve-its-land-certification-problem/>. diakses tanggal 16 maret 2020
- Cohen S.I. 1978. Agrarian development and the economics of agrarian reform. In: Agrarian structures and agrarian reform. Studies in development and planning, vol 8. Springer, Boston, MA. page 4-42

- Clifford Mabhena.2014. Livestock livelihoods compromised: The dilemma of the Fast Track Land Reform and Resettlement Programme in Matabeleland South, Zimbabwe. *Journal of contemporary African studies*,Pages 100-117..
- Ellis, Frank 1992 *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. Diakses 22 Mei 2020
- Fenske, James. 2011. "Land tenure and investment incentives: Evidence from West Africa". *Journal of Development Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.05.001>
- Ghebru, Hosaena., Holden, Stein T. 2015, "Technical Efficiency and Productivity Differential Effects of Land Right Certification: A Quasi Experimental Evidence". *Quarterly Journal of International Agriculture*. <http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.206294>
- Gunawan Wiradi. 2000. *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar
- Holden, Stein T., Deininger, Klaus., Ghebru., Hosaena. 2009. "Impacts of Low-Cost Land Certification on Investment and Productivity". *American Journal of Agricultural Economics*. <https://academic.oup.com/ajae/article-abstract/91/2/359/77293>
- Hsiao.1996. *Capital, The State, And Late Industrialization: Comparative Perspectives On the Pasific Rim*, chapter 6
- Imaduddin Abdullah Pemerintah Diminta Bentuk Badan Pengelola Reforma Agraria Edisi 4 Mei 2017 <https://yogyakarta.kompas.com/read/2017/05/04/223331226/pemerintah.diminta.bentuk.badan.pengelola.reforma.agraria> diakses 16 mei 2020
- Istikomah. 2013." Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil: Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 di Kabupaten Kulon Progo. *Kawistara*. Vol. 3. April. 1-116.
- J.C. Breman & G. Wiradi. 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa*. Jakarta: LP3ES
- Kantor Staf Presiden. 2016." Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019". Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 April.
- Kaewkallaya, N., R.P. Shrestha, & A.P. Tibkaew (2014) Effect of Agricultural Land Reform Development Project on Rural Livelihood: Experience from Thailand. *International Journal of Environmental and Rural Development* 5(1), 20-25.

- Mahpud, dkk. 2015, "Determinan kesediaan nelayan menggunakan sertipikat hak atas tanah dan dampaknya terhadap pendapatan", *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol.13. No. 1, Maret. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr>.
- Melesse, Mequanint B., Bulte, Erwin. 2015. "Does land registration and certification boost farm productivity? Evidence from Ethiopia". *Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/agec.12191>
- Mulyani, L., H. Yogaswara, L. Masnun, and R. Mardiana (2011) *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan*. LIPI, Jakarta.
- Mulyaqin, Tian., Haryani, Dewi. 2013. Aksesibilitas Petani Padi Sawah Terhadap Sumber Permodalan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Banten. *Buletin IKATAN* Vol. 3 No. 2. Banten.
- Nasikun (1990), "Tanah dan Struktur Sosial di Indonesia", Makalah dalam Seminar Tanah, Rakyat, dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh LAPPESA.
- N. Kaewkallaya, RP Shrestha, AP Tibkaew. 2014. Effect of agricultural land reform development project on rural livelihood: experience from Thailand. *international Journal of Environmental and Rural*. Page 20-25
- Ningtyas, P.M.K., and A.H. Dharmawan (2010) *Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(3), 333-344. doi:10.22500/sodality.v4i3.5840
- Nurmanaf, A.R. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 5 No. 2 Juni 2007: 99-109
- Rahmania. 2019. " Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan di Wilayah Malang Raya". *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Risnarto, 2006, Analisis Manajemen Agraria Indonesia, Program Pascasarjana-Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor http://courses.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/Risnarto_Bab_12-16.pdf
- Saturnino M. Borras. 2006. Pro-poor Land Reform: A Critique. *Studies in International Development and Globalization Series*. University of Ottawa Press, Isbn 0776606506. Diakses tanggal 29 mei 2020

- Stein T. Holden, Klaus Deininger, Hosaena Ghebru. 2009. Impacts of Low-Cost Land Certification on Investment and Productivity *American Journal of Agricultural Economics*, Volume 91, Issue 2, May 2009, Pages 359–373, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2008.01241.x>
- Sumardjono, MSW 2008, Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya. Kompas, Jakarta
- Suthiporn Chirapanda. 2000. National Report on Agrarian Reform and Rural Development in Thailand. Prepared by Agricultural Land Reform Office, Ministry ..., 2006
- Soetiknyo, Iman. 1990. Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syahyuti.2017.” Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.\
- TH Shen 1968. Land Reform and its Impact on Agricultural Development in Taiwan - Land Reform in Developing Countries
- Tim Peneliti Smeru, 2002, “ Evaluasi Dampak Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui PAP”, Laporan Penelian Smeru, Mei.
- Utami, P.A.R. (2014) Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai. *Premise Law Jurnal* 1(1), 1-16.
- Wahid, Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta
- Widodo.2009. Strategi nafkah rumah tangga miskin di daerah pesisir Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur. Tesis pada Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB hal 56-66

LAMPIRAN

Provinsi	Freq.	Percent	Cum.
Banten	120	18.07	18.07
DIY	139	20.93	39.01
Jawa Tengah	124	18.67	57.68
Jawa Barat	159	23.95	81.63
Jawa Timur	122	18.37	100.00
Total	664	100.00	

Lapangan Pekerjaan	Freq.	Percent	Cum.
Pertanian/Perkebunan	307	46.23	46.23
Peternakan	7	1.05	47.29
Perikanan	21	3.16	50.45
Pertambangan dan Penggalian	2	0.30	50.75
Industri	54	8.13	58.89
Listrik, Gas, Air Minum	4	0.60	59.49
Perdagangan	76	11.45	70.93
Rumah Makan/Restoran	1	0.15	71.08
Penyediaan Akomodasi	1	0.15	71.23
Transportasi dan Pergudangan	10	1.51	72.74
Komunikasi	2	0.30	73.04
Jasa Keuangan, real Estate, Jasa Perusa	20	3.01	76.05
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Peroran	95	14.31	90.36
Lainnya	64	9.64	100.00
Total	664	100.00	

Akses Kredit	Freq.	Percent	Cum.
Ya	299	46.57	46.57
Tidak	343	53.43	100.00
Total	642	100.00	

Jenis Kegiatan Ekonomi Bidang Tanah	Freq.	Percent	Cum.
Non Pertanian, tempat tinggal	64	9.52	9.52
Non Pertanian, bukan tempat tinggal	23	3.42	12.95
Pertanian	108	16.07	29.02
Lainnya	477	70.98	100.00
Total	672	100.00	

Kabupaten/Kota	Freq.	Percent	Cum.
Bantul	55	8.28	8.28
Ciamis	87	13.10	21.39
Cianjur	72	10.84	32.23
Demak	86	12.95	45.18
Kulon Progo	84	12.65	57.83
Lebak	62	9.34	67.17
Malang	63	9.49	76.66
Mojokerto	59	8.89	85.54
Pandeglang	58	8.73	94.28
Semarang	38	5.72	100.00
Total	664	100.00	

Status Penggunaan Sertifikat	Freq.	Percent	Cum.
Sudah	233	35.09	35.09
Belum/Tidak	431	64.91	100.00
Total	664	100.00	

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
B10kK2	664	3736069	2857206	380000	3.84e+07

. sum pengeluaran

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
pengeluaran	598	1057486	755396.3	122500	9610000

. sum C1

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
C1	625	1491.205	3065.403	33	40000

. sum tanah

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
tanah	572	1.52e+08	4.69e+08	800	9.00e+09

Program	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Baseline	993771.21	768197.3	182
PTSL 2017	1071634.7	766073.67	331
Pemberday	1138815	679769.19	85
Total	1057486.1	755396.33	598

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	1.3673e+12	2	6.8366e+11	1.20	0.3023
Within groups	3.3929e+14	595	5.7024e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(2) = 1.9730$ Prob> $\chi^2 = 0.373$

Pelatihan	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Ya	1182383.4	871195.76	182
Tidak	1014412.5	684188.18	384
Total	1068424.4	752749.55	566

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	3.4838e+12	1	3.4838e+12	6.20	0.0130
Within groups	3.1666e+14	564	5.6146e+11		
Total	3.2015e+14	565	5.6663e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 15.0483$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Bantuan Pemasaran	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Ya	1152348	1071824.9	82
Tidak	1056707.8	684946.74	482
Total	1070612.9	753153.97	564

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	6.4101e+11	1	6.4101e+11	1.13	0.2882
Within groups	3.1872e+14	562	5.6711e+11		
Total	3.1936e+14	563	5.6724e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 33.8870$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Lapangan Pekerjaan	Summary of pengeluaran		Freq.
	Mean	Std. Dev.	
Pertanian	997485.65	561273.76	271
Peternaka	692458.33	95117.088	6
Perikanan	1080353.3	840387.42	20
Pertamban	1973750	1974595.7	2
Industri	1012292.2	499215.48	53
Listrik,	1172291.7	806588.42	4
Perdagang	1258714.6	1213181.4	72
Rumah Mak	2370000	0	1
Transport	867187.5	444022.4	8
Komunikas	885000	0	1
Jasa Keua	1132588	905294.85	18
Jasa Kema	1235596.7	952142.15	87
Lainnya	823721.66	453463.54	55
Total	1057486.1	755396.33	598

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	1.4450e+13	12	1.2042e+12	2.16	0.0123
Within groups	3.2621e+14	585	5.5763e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(10) = 144.7258$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Akses Kredit	Summary of pengeluaran		Freq.
	Mean	Std. Dev.	
Ya	1188085.5	901873.52	279
Tidak	967811.16	576737.05	302
Total	1073588.3	758032.15	581

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	7.0366e+12	1	7.0366e+12	12.49	0.0004
Within groups	3.2624e+14	579	5.6345e+11		
Total	3.3328e+14	580	5.7461e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 56.4919$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Jenis Kegiatan Ekonomi Bidang Tanah	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Non Pertama	973019.67	402022.36	53
Non Pertama Pertanian Lainnya	1764043.8	873187.28	22
Pertanian Lainnya	937254.16	611882.93	97
Lainnya	1058882.8	793413.79	426
Total	1057486.1	755396.33	598

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	1.2764e+13	3	4.2547e+12	7.71	0.0000
Within groups	3.2790e+14	594	5.5202e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(3) = 38.2057$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Kabupaten/Kota	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Bantul	753205.11	361003.13	48
Ciamis	1013235.1	733546.16	75
Cianjur	917457.12	491814.46	55
Demak	1301666.7	671716.21	82
Kulon Pro	838638.43	519152.45	65
Lebak	1031959.6	1173736.6	59
Malang	1137917.9	1168662	63
Mojokerto	1190662.4	554114.67	59
Pandeglan	1051043.7	554142.86	54
Semarang	1287948.5	569733.59	38
Total	1057486.1	755396.33	598

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	1.7185e+13	9	1.9094e+12	3.47	0.0003
Within groups	3.2348e+14	588	5.5013e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(9) = 149.0734$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Status Penggunaan Sertifikat	Summary of pengeluaran		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Sudah	1170492.9	829142.87	206
Belum/Tid	998099.91	707497.51	392
Total	1057486.1	755396.33	598

Source	Analysis of Variance			F	Prob > F
	SS	df	MS		
Between groups	4.0132e+12	1	4.0132e+12	7.10	0.0079
Within groups	3.3665e+14	596	5.6485e+11		
Total	3.4066e+14	597	5.7062e+11		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(1) = 6.9590$ Prob> $\chi^2 = 0.008$

Lapangan Pekerjaan	Program			Total
	Baseline	PTSL 2017	Pemberday	
Pertanian/Perkebunan	70	203	34	307
Peternakan	2	5	0	7
Perikanan	0	6	15	21
Pertambangan dan Peng	0	1	1	2
Industri	42	10	2	54
Listrik, Gas, Air Min	1	2	1	4
Perdagangan	28	28	20	76
Rumah Makan/Restoran	1	0	0	1
Penyediaan Akomodasi	0	1	0	1
Transportasi dan Perg	2	7	1	10
Komunikasi	1	1	0	2
Jasa Keuangan, real E	6	10	4	20
Jasa Kemasyarakatan,	38	49	8	95
Lainnya	9	42	13	64
Total	200	365	99	664

Pearson $\chi^2(26) = 163.1061$ Pr = 0.000

Akses Kredit	Program			Total
	Baseline	PTSL 2017	Pemberday	
Ya	77	169	53	299
Tidak	120	183	40	343
Total	197	352	93	642

Pearson $\chi^2(2) = 8.7855$ Pr = 0.012

Jenis Kegiatan Ekonomi Bidang Tanah	Program			Total
	Baseline	PTSL 2017	Pemberday	
Non Pertanian, tempat	9	45	10	64
Non Pertanian, bukan	7	15	1	23
Pertanian	45	49	14	108
Lainnya	139	256	74	469
Total	200	365	99	664

Pearson chi2(6) = 17.5540 Pr = 0.007

Kabupaten/Kota	Program			Total
	Baseline	PTSL 2017	Pemberday	
Bantul	23	32	0	55
Ciamis	14	40	33	87
Cianjur	25	47	0	72
Demak	21	52	13	86
Kulon Progo	25	59	0	84
Lebak	31	13	18	62
Malang	20	43	0	63
Mojokerto	21	20	18	59
Pandeglang	0	49	9	58
Semarang	20	10	8	38
Total	200	365	99	664

Pearson chi2(18) = 174.4436 Pr = 0.000

Status Penggunaan Sertifikat	Program			Total
	Baseline	PTSL 2017	Pemberday	
Sudah	27	151	55	233
Belum/Tidak	173	214	44	431
Total	200	365	99	664

Pearson chi2(2) = 65.4541 Pr = 0.000

PUSLITBANG ATR/BPN



PRESS

ISBN 978-623-96953-7-8



9 786239 695378